

# Pengantar Sosiologi Pemerintahan

Prof. Dr. Drs H. Utang Suwaryo, M.A.



## PENDAHULUAN

---

Permasalahan yang muncul dan harus dihadapi manusia dan/atau masyarakat secara umum tidaklah dapat dengan mudah diselesaikan oleh satu disiplin ilmu saja. Apalagi dalam perkembangannya, secara empiris teori-teori dalam suatu ilmu termasuk rumpun ilmu sosial, sering kali tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk saat sekarang meminjam konsep, teori, ataupun pandangan yang dimiliki suatu ilmu dan memadukannya dengan ilmu yang lainnya menjadi hal yang menarik. Apabila dikaitkan dengan upaya semakin memantapkan suatu disiplin ilmu, maka meminjam konsep dan teori serta pandangan tersebut menjadi sangat penting karena kematangan akan sangat sulit dicapai jika hanya mengandalkan konsep dan teorinya sendiri.

Hal tersebut semakin penting karena dengan peminjaman konsep, teori, pandangan, dan metodenya serta memadukannya dengan yang dimiliki oleh ilmu tertentu ternyata secara efektif mampu menjelaskan realita sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan, dan bernegara dengan lebih bermakna. Sering kali kondisi tersebut juga mampu menjelaskan akar masalah yang menjadi determinan pada timbulnya realita sosial di masyarakat. Sebagai contoh untuk menjelaskan permasalahan efektivitas kebijakan pemerintah agar dapat dipahami yang diperintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka ilmu pemerintah memerlukan konsep dan teori yang membahas tentang realitas sosial, ekonomi, dan budaya yang diperintah. Untuk keperluan tersebut maka sosiologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial sangat dibutuhkan.

Berkaitan dengan uraian di atas, Anda dapat lebih memahaminya dengan mempelajari modul pertama ini karena Modul 1 ini pada dasarnya akan menjadi pintu masuk untuk menelusuri topik-topik atau pokok-pokok bahasan yang akan dikaji pada modul-modul selanjutnya. Setelah membaca dan mempelajari materi modul pertama ini, diharapkan pemahaman Anda

terkait hubungan antara sosiologi dengan pemerintahan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dasar yang ada dalam sosiologi pemerintahan dapat meningkat.

Untuk kepentingan pemahaman Anda terhadap sosiologi pemerintahan maka dalam Modul 1 ini Kegiatan Belajar dibagi 3 (tiga) seperti berikut.

1. Urgensitas Sosiologi dalam Mengkaji Pemerintahan.
2. Batasan Etimologi dan Konseptual tentang Sosiologi Pemerintahan.
3. Ragam Penelitian dalam Studi Sosiologi Pemerintahan.

Secara umum, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan pemahaman secara garis besar terhadap sosiologi pemerintahan. Adapun secara khusus, Anda diharapkan memiliki kompetensi dalam menjelaskan berikut ini.

1. Ilmu Pengetahuan Sebagai Suatu Perspektif.
2. Konsep-konsep Dasar Sosiologi.
3. Tradisi dan Teorisasi Sosiologi.
4. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik dan Sosiologi.
5. Mendefinisikan Sosiologi Pemerintahan.
6. Ruang Lingkup Studi Sosiologi Pemerintahan.
7. Pendekatan-pendekatan dalam Studi Sosiologi Pemerintahan.
8. Paradigma Ilmu dan Penelitian dalam Studi Sosiologi Pemerintahan.
9. Ragam Penelitian dalam Studi Sosiologi Pemerintahan.

## KEGIATAN BELAJAR 1

# Urgensitas Sosiologi Dalam Mengkaji Pemerintahan

Salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa Universitas Terbuka di mana pun Anda berada. Pada Kegiatan Belajar 1 ini, kita akan membahas terkait posisi atau kedudukan sosiologi ketika kita akan mengkaji gejala-gejala pemerintahan dan sekaligus relasinya dengan ilmu pemerintahan. Pembahasan ini menjadi penting karena akan membawa kita pada upaya memahami sosiologi pemerintahan beserta ruang lingkungannya.

Saudara mahasiswa, sama halnya dengan negara, sebagai suatu entitas sosial pemerintahan pun pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial. Keberadaannya dan perkembangannya akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh gejala sosial lainnya termasuk negara itu sendiri. Selain itu, karena pemerintahan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara (nasional) maka relasi sosial—politik juga terjalin di antara pemerintah dengan pemerintahan. Artinya, eksistensi dan perubahan yang terjadi pada keduanya akan saling memengaruhi.

Mengingat kuatnya relasi negara dengan pemerintah dan pemerintahan maka keberadaan pemerintah dengan sendirinya juga memiliki relasi yang sama kuatnya dengan masyarakat. Hal ini terkait dengan eksistensi negara yang merupakan salah satu bentuk kesatuan (asosiasi) sosial masyarakat yang hadir ketika individu manusia mulai menyatukan diri dan hidup bersama, berkelompok dan bermasyarakat sampai bernegara. Dalam hal ini negara bukanlah suatu tujuan akhir bagi masyarakat manusia, tetapi merupakan alat atau sarana yang akan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tersebut pada akhirnya menjadi tujuan bernegara. Dalam upaya mewujudkannya, negara membentuk organ-organ atau lembaga-lembaga negara yang disebut pemerintah. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan negara dalam membantu masyarakat yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya dan mewujudkan tujuan negara itu dalam perspektif ilmu pemerintahan disebut pemerintahan.

Dari penjelasan singkat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam mengkaji pemerintahan sebagai suatu gejala sosial, kita dapat menggunakan sosiologi sebagai salah satu perspektif (cara pandang). Dengan

menggunakannya sebagai salah satu perspektif, kajian pemerintahan akan menjadi lebih kaya dan berwarna baik dalam hal konsep-konsepnya maupun teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis gejala-gejala pemerintahan yang juga merupakan gejala sosial itu. Untuk saat sekarang, pemerintahan itu bahkan sudah menjadi realitas sosial dengan saling bertautnya antar gejala-gejala pemerintahan dan antara gejala pemerintahan dengan gejala sosial di sekitar pemerintahan, sehingga menjadi tidak mungkin lagi untuk mengkaji pemerintahan dengan segala permasalahannya hanya dengan menggunakan satu disiplin ilmu sosial, dalam hal ini Ilmu Pemerintahan saja.

Dalam Kegiatan Belajar 1 pada Modul 1 ini, kita akan membahas pertautan ilmu pemerintahan dengan sosiologi sehingga membentuk cabang baru, yaitu sosiologi pemerintahan. Jika dilihat dari kemandirian dan kematangannya, sosiologi jauh lebih baik dibanding ilmu pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan sosiologi pemerintahan ini, sosiologi menjadi suatu perspektif bagi ilmu pemerintahan, sehingga konsep, tradisi, teorisisasi, dan ragam penelitiannya akan mengadopsi dari sosiologi.

## **A. ILMU PENGETAHUAN SEBAGAI SUATU PERSPEKTIF**

Dalam perkembangannya, ilmu pemerintahan dan sosiologi tidak hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi sudah menjadi suatu ilmu (pengetahuan), walaupun belum ada kesepakatan para ahli tentang definisi ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, mengingat adanya 2 rumpun besar dalam ilmu pengetahuan itu yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, maka definisi ilmu pengetahuan pun mengikuti dua rumpun tersebut. Tentu saja, kita tidak bisa menggunakan perumusan ilmu pengetahuan dari rumpun ilmu alam untuk menilai derajat keilmuan ilmu-ilmu yang ada dalam rumpun ilmu sosial. Jika hal itu dilakukan maka semua ilmu sosial termasuk ilmu pemerintahan dan sosiologi kemungkinan sulit untuk dapat memenuhi persyaratan untuk disebut ilmu pengetahuan seperti harus adanya kepastian dalam ilmu pengetahuan rumpun ilmu alam. Hubungan Pemerintahan dengan yang diperintah (masyarakat) yang dalam hubungan tersebut senantiasa berubah, jelas tidak akan mungkin ditemukan hukum-hukum yang bersifat umum. Hal yang sama pun berlaku dengan sosiologi karena objek kajiannya jelas-jelas manusia dan relasinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitar yang juga selalu berdinamika (berubah-ubah).

Kalau merujuk pada pandangan Kerlinger (2000) sosiologi tidak hanya bersifat statis tetapi sekaligus dinamis. Dengan terus dilakukan pengkajian pada berbagai gejala sosial yang melahirkan berbagai konsep sosial oleh para sosiolognya, kematangan dan kemandirian sosiologi sebagai suatu ilmu tidak perlu dirangkai lagi. Dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada rumpun ilmu-ilmu sosial, sosiologi bersama ilmu-ilmu lainnya menjadi salah satu cara pandang atau perspektif terhadap realitas sosial, termasuk dalam mengkaji pemerintahan.

Setiap ilmu pengetahuan tentunya memiliki sasaran yang akan dikajinya. Sasaran tersebut tidak hanya milik suatu ilmu, adakalanya sasaran suatu ilmu juga menjadi sasaran bagi ilmu-ilmu lainnya baik yang serumpun maupun yang tidak. Sasaran tersebut secara umum terbagi dua ada sasaran pokok dan sasaran sampingan. Sasaran pokok pada dasarnya menjadi bidang yang dikaji oleh satu rumpun ilmu, misalnya untuk rumpun ilmu sosial sasaran pokoknya yaitu realitas sosial yang terkait dengan kehidupan sosial dan segala aktivitas yang dilakukan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok sosial sebagai gejala-gejala sosial.

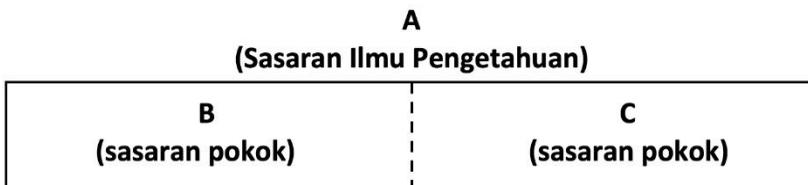
Untuk memiliki kekhasan dan berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan yang satu rumpun karena tentunya akan banyak kesamaannya, suatu ilmu harus memilih satu atau beberapa titik bidik pada bidang yang menjadi sasaran pokok karena pada sasaran pokok pun seperti telah dijelaskan juga menjadi sasaran ilmu dalam rumpun yang sejenis. Dengan sendirinya ilmu yang lainnya harus memilih titik-titik yang lain yang belum dijadikan atau dipilih sebagai titik bidik oleh ilmu-ilmu lainnya. Misalnya Ilmu Politik menetapkan titik bidik untuk dikajinya adalah kekuasaan dan cara-cara memerolehnya, sedangkan sosiologi menjadikan relasi manusia dengan lingkungannya sebagai titik bidiknya. Adapun ilmu pemerintahan lebih tertarik untuk menjadikan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah sebagai titik bidangnya.

Dalam khazanah ilmu pengetahuan, sasaran dan titik dalam sasaran tersebut disebut objek ilmu pengetahuan. Secara umum kita mengenal dua jenis objek yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan sasaran atau bahasan kajian secara material yang menjadi perhatian suatu ilmu. Terkait dengan penjelasan di atas maka objek material ini merujuk pada sasaran kajian baik yang bersifat pokok maupun sampingan. Sementara, objek formal atau *focus of interest* merupakan cara pandang atau perspektif

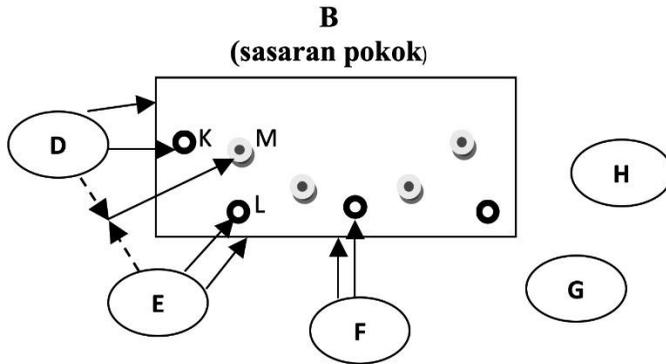
suatu ilmu terhadap objek yang menjadi sasaran pokoknya. Objek formal ini terkait dengan titik bidik suatu ilmu.

Dari penjelasan di atas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa setiap disiplin ilmu memiliki otoritas tunggal dan bersama dalam mengkaji suatu realitas sosial yang merupakan kumpulan gejala-gejala sosial yang saling berelasi dan berinteraksi sebagai objek kajian. Otoritas tunggal terkait dengan kajian yang hanya ilmu tersebutlah yang menaruh perhatian pada objek tersebut. Otoritas tunggal pada objek kajian ini nantinya akan menjadi ciri khas (objek formal) atau pusat perhatian atau *focus of interest* dari ilmu tersebut. Sementara, ketika objek kajian itu menjadi bidang kajian atau sasaran bersama maka setiap disiplin ilmu tidak lagi dapat mengklaimnya sebagai titik bidiknya sendiri karena sudah menjadi otoritas bersama dan titik bidik bersama itu menjadi objek material suatu ilmu. Secara sederhana penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan 1.2.

Sebagai salah satu ilmu dalam rumpun ilmu sosial, kematangan ilmu pemerintahan tidak dapat disetarakan dengan sosiologi. Selama ini, pendekatan yang sering kali digunakan untuk mengkaji gejala-gejala pemerintahan lebih banyak mengadopsi dari disiplin ilmu politik, hukum, manajemen, ataupun administrasi. Bahkan beberapa ahli meyakini bahwa pemerintahan itu merupakan salah satu gejala politik. Konsep-konsep pemerintahan pun diyakini sebagai bagian dari kajian politik. Oleh karena itu, penggunaan sosiologi sebagai perspektif dalam mengkaji pemerintahan tidak hanya memungkinkan memberi kontribusi pada konteks praktik penyelenggaraan pemerintahan, tetapi lebih dari itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kematangannya. Untuk itu, pada pembahasan selanjutnya akan diuraikan tentang konsep-konsep dasar, tradisi, dan teorisasi sosiologi.



Gambar 1.1  
Sasaran Ilmu Pengetahuan



Gambar 1.2  
Sasaran Pokok Ilmu Pengetahuan dan Titik Bidik Bersama  
Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi

A, adalah sasaran ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 2 (dua) sasaran pokok dan sampingan.

B, merupakan sasaran pokok (bagi rumpun ilmu sosial) tetapi menjadi sasaran sampingan bagi C (rumpun ilmu alam), sebaliknya

C menjadi sasaran pokok bagi rumpun ilmu alam, tetapi hanya sebagai sasaran sampingan bagi rumpun ilmu sosial (B).

D, E, F, G, dan H adalah ilmu pengetahuan yang satu rumpun misalnya D (ilmu pemerintahan), E (sosiologi), F (ilmu politik).

K, adalah titik bidik ilmu pemerintahan dan L adalah titik bidik sosiologi.

Ada titik bidik lain yaitu M, yang akan lebih tepat jika menjadi titik bidik bersama antara ilmu pemerintahan dan sosiologi.

## B. KONSEP-KONSEP DASAR SOSIOLOGI

Sebagai suatu ilmu yang sudah matang dan mandiri, sosiologi tentunya memiliki konsep-konsep dasar yang akan digunakan ketika hendak menjelaskan gejala sosial yang telah menjadi fakta dan realitas sosial. Ada banyak literatur yang membahas tentang konsep dasar sosiologi ini, masing-masing memiliki dasarnya sendiri dalam memilih dan memilah konsep-konsep tersebut. Terkait dengan sosiologi pemerintahan, banyak konsep-konsep sosiologi yang sedikit banyak ada keterkaitan dengan ilmu

pemerintahan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala, fakta, dan realitas pemerintahan. Berikut beberapa konsep yang akan dibahas dalam modul ini:

### **1. Struktur Sosial**

Struktur sosial merupakan salah satu konsep utama yang dimiliki sosiologi dan seolah menjadi domainnya sosiologi, bahkan sangat identik dengan sosiologi. Konsep ini sering kali digunakan untuk menjelaskan relasi yang terbangun dalam kehidupan sosial manusia dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lingkungannya, masyarakat dengan pemimpinnya atau pemerintahnya dan lain-lain. Penjelasan struktur sosial yang relatif lebih lengkap dan mudah dimengerti dapat dilihat pada batasan konseptual dari Sanderson (1993). Menurutnya struktur sosial merujuk pada segala hal yang dilakukan orang secara aktual dan bukan pada yang mereka katakan mereka lakukan atau pun pada yang mereka pikir mereka lakukan dan yang mereka pikir harus mereka lakukan. Singkatnya struktur sosial ini berisi hal-hal yang dilakukan orang secara nyata (aktual) bukan pada hal-hal yang masih ada dalam pikiran dan ucapannya ataupun dalam gagasan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa struktur sosial ini berisikan enam sub unit yaitu ada atau tidaknya stratifikasi sosial, stratifikasi etnis dan rasial, kepolitikan, pembagian kerja secara seksual dan ketidaksamaan secara seksual, keluarga dan kekerabatan, serta pendidikan.

### **2. Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial merupakan bagian dari struktur sosial, tetapi terkadang ada saja orang yang menyamakan kedua konsep ini, bahkan sepertinya sangat identik. Orang akan teringat stratifikasi sosial saat sedang membahas struktur sosial. Sama halnya dengan struktur sosial, konsep dasar ini pun seolah hanya menjadi milik sosiologi.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapatnya Pitirin A. Sorokin (1959). Menurut stratifikasi sosial merupakan struktur sosial vertikal yang diartikan sebagai suatu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Wujudnya dapat dilihat dari adanya kelas tinggi dan yang lebih rendah yang didasarkan pada adanya ketidaksamaan/ketidakeimbangan dalam pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab, nilai-nilai sosial dan pengaruhnya terhadap anggota-anggota masyarakat. Adapun struktur sosial horizontal disebut diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini digambarkan

sebagai suatu kondisi yang ditandai dengan adanya variasi atau kekayaan pengelompokan yang ada dalam masyarakat. Jadi, diferensiasi sosial tidak berbicara tinggi atau rendahnya kedudukan dalam masyarakat, tetapi kompleksitas atau variasi yang terjadi dalam masyarakat. Semakin maju atau berkembang suatu masyarakat maka semakin bervariasi atau kompleks pengelompokannya.

Sebagai suatu konsep sosiologi, menurut Sorokin (1959) stratifikasi atau pelapisan masyarakat tersebut merupakan ciri tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Artinya, pada suatu masyarakat yang sudah memiliki keteraturan dalam hidupnya yang ditandai dengan kesadaran untuk hidup bersama di dalam suatu organisasi sosial, stratifikasi sosial akan tetap melekat. Hal ini disebabkan stratifikasi itu merupakan sifat dasar masyarakat.

Selain itu, stratifikasi sosial dalam masyarakat tersebut akan terus ada dan terjaga karena aktivitas dalam masyarakat senantiasa terus terjaga untuk saling berelasi dan berinteraksi. Hal lainnya yaitu dalam masyarakat tampaknya kehadiran stratifikasi sosial dikehendaki oleh masyarakat secara umum. Artinya, perbedaan kedudukan di antara anggota masyarakat seolah menjadi bagian dan sifat dasar dari eksistensi manusia, terutama bagi mereka yang memiliki kelebihan dibanding yang lainnya dan juga terkait dengan peran yang dimainkannya dalam masyarakat (pembagian kerja) yang berimplikasi pada tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Konsep ini pun begitu erat kaitannya dengan ilmu pemerintahan sehingga dapat juga dijadikan sebagai landasan konseptual dan teoritis untuk menjelaskan gejala, fakta, dan realitas pemerintahan. Sebagai contoh yaitu adanya pemimpin dan yang dipimpin, adanya pemerintah dan yang diperintah, adanya kelas elit dan kelas massa, *governing elite* dan *non governing elite* seperti dikemukakan oleh Pareto dan Mosca.

### **3. Kekuasaan dan Kewenangan**

Konsep lain yang juga merupakan konsep dasar sosiologi dan bersentuhan dengan ilmu pemerintahan dan membahas gejala, fakta, dan realitas pemerintahan adalah kekuasaan dan kewenangan. Berbicara kekuasaan pada dasarnya membahas tentang pengaruh, baik memengaruhi maupun dipengaruhi. Ketika seseorang mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan hal yang dikehendaki oleh seseorang tersebut, maka seseorang tersebut memiliki kekuasaan. Sifat pengaruhnya sendiri dapat positif ataupun negatif tergantung pada niat dan motivasi si

pemilik kekuasaan. Dari sini kita dapat memahami bahwa tiap orang pada hakikatnya dapat memiliki kekuasaan, tetapi juga dapat dikuasai. Kondisi tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam memperoleh akses pada sumber-sumber kekuasaan seperti materi (uang), status sosial, pengetahuan, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan ilmu pemerintahan, konsep kekuasaan ini dapat dilihat pada adanya pemerintah dan yang diperintah. Pemerintah menjadi pihak yang berkuasa, bahkan tidak hanya sebatas itu karena kekuasaan yang dimiliki pemerintah adalah kekuasaan formal atau kewenangan. Kekuasaan seperti ini memiliki “derajat paksaan” yang lebih luas karena adanya pengakuan dari yang diperintah sebagai pihak yang dikuasai.

Masih ada konsep-konsep dasar sosiologi yang lainnya dan dapat digunakan dalam menganalisis gejala, fakta, dan realitas pemerintahan, seperti kelembagaan dan birokrasi, perubahan sosial dan lain-lain. Penjelasan lebih lanjut dapat Saudara baca pada modul-modul berikutnya, tentunya setelah selesai mempelajari modul-modul sebelumnya khususnya modul pertama ini.

### **C. TRADISI DAN TEORISASI SOSIOLOGI**

Dalam perkembangannya para ahli membagi sosiologi ke dalam beberapa tradisi dan teorisasi. Randall Collins (1994) membagi sosiologi ke dalam empat tradisi besar yaitu tradisi konflik, yang beberapa poin utamanya dikemukakan oleh Karl Marx sebagai tokoh utama tradisi konflik; Tradisi rasional/utilitarian, tradisi ini sangat memiliki kedekatan dan berhubungan dengan disiplin ekonomi. Pada akhir tahun 1800an utilitarianism tidak banyak digunakan dan ekonomi lebih diprofesionalkan sampai pada tahun 1950an ketika sosiolog mulai memformulasikan teori yang dikenal dengan teori pertukaran sosial. Di bidang lain seperti politik, filsafat, dan beberapa ahli ekonomi memilih pendekatan ini untuk mengaplikasikan di bidang yang mereka tekuni pada tahun 1970an dan 1980an, paham ini berkembang luas dan biasa disebut sebagai "pilihan rasional" dan ada beberapa yang menyebut "tindakan rasional", di bidang orientasi kebijakan menyebutnya "pilihan publik" teori. Randall sendiri menggunakan istilah utilitarian untuk menyebut tradisi ini.

Tradisi Durkheim. Collin membagi Tradisi Pemikiran Durkheim dalam dua pandangan yang berhubungan dengan penekanan makro atau mikro. Pendahulunya sebagian besar adalah sosiologis makro, seperti Montesqueau, Comte, dan Spencer. Durkheim sendiri menambahkan mikroaplikasi melalui Teori Ritual. Oleh karena itu, pemikiran Durkheim ada dua pandangan, yang satu dari level teori makro tentang pembagian kerja dan struktur sosial secara umum dan merujuk pada Talcot Parson dan para Fungsionalis seperti Bourdieu dengan Teori Kapital Kultural. Pandangan lainnya dari para pengikutnya (Durkheim) dan menemukan aplikasi yang modern atas teori mikro melalui para sosiologis seperti Erving Goffman dan Basil Bernstein.

Tradisi mikrointeraksionis merupakan perspektif utama yang paling umum menganalisa saling ketergantungan antara kesadaran subjektif dan pola-pola interaksi di tingkat mikro. Teori ini lahir dari pemikiran tokoh-tokoh yang menganut filsafat pragmatis hasil pengalaman dan kebudayaan Amerika yang dipelopori pemikiran John Dewey dan Charles Sanders Peirce, menerima prinsip evolusi Darwin bahwa organisme terus menerus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta sarat idealisme dialektis Jerman yang melihat perubahan relativitas dalam bentuk-bentuk kesadaran. Tokoh-tokoh penting dalam perspektif ini di antaranya Charles Horton Cooley (1846–1929), George Herbert Mead (1863–1931) dan William I. Thomas (1863-1947). Tokoh ini memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Idenya bahwa kenyataan sosial muncul dari proses interaksi.

Untuk teoritisasinya dikemukakan oleh Jonathan H. Turner dkk (1998) dalam bukunya *The Structure of Sociological Theory* dengan membagi sosiologi ke dalam tujuh perspektif. *Perspektif teoritik pertama* yaitu perspektif fungsionalisme sebagai orientasi teoritik pertama sosiologi. Fungsionalisme memiliki keunikan dalam menganalisis kekuatan dan struktur sosial untuk menentukan konsekuensi keduanya bagi pemenuhan dan syarat keutuhan sosial. Dalam perspektif ini August Comte yang menciptakan fungsionalisme melalui penganalogian masyarakat dengan organisme hidup dalam biologi. Walaupun masih kasar dan sederhana, pemikiran Comte ini telah menyediakan model untuk legitimasi sosiologi di bawah mantra agar lebih dihormati ilmu biologi dan juga strategi untuk melakukan penelitian sosiologi.

Dalam perspektif ini juga tergabung teori-teori fungsional lainnya seperti dikemukakan Herbert Spencer dengan *The Principles of Sociology* yang secara sistematis membandingkan masyarakat dengan organisme. Durkheim juga dengan *The Division of Labor*nya memberikan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi dalam masyarakat pada perspektif ini. Teori fungsionalisme lain yang masuk perspektif ini adalah yang ada dalam tradisi antropologi dengan pemikirnya Malinowski yang menguraikan tentang tiga level sistem yaitu biologikal, struktur sosial, dan simbolik serta Radcliffe-Brown yang mengakui konsep fungsi yang diterapkan pada masyarakat manusia didasarkan pada analogi antara kehidupan sosial dan kehidupan organik. Pemikiran Weber juga ada yang termasuk pada perspektif ini di antaranya ada dua aspek yang berpengaruh yaitu pandangan substantifnya tentang aksi sosial dan strategi untuk analisis struktur sosial.

Teori-teori selanjutnya yang masuk perspektif ini disumbangkan dari pemikiran Robert K. Merton dengan pendekatan empiriknya. Secara umum Merton melihat teori fungsional dalam tiga postulat: 1) kesatuan fungsional dari sistem sosial, 2) keuniversalan fungsional dari item-item sosial, 3) suatu keharusan item-item fungsional untuk sistem sosial. Sedangkan pendekatan analisisnya dikemukakan oleh Talcott Parson dengan *the structure of social action*nya. Adapun teori neofungsionalisme dikemukakan oleh Jeffrey C. Alexander. Bagi Alexander, dunia sosial itu multidimensional. Ia juga mengemukakan dua hal penting dalam teori sosiologi yaitu *action* dan *order*. Terakhir, teori yang masuk dalam perspektif ini yaitu sistem fungsionalisme dari Niklas Luhman dengan pendekatan sistem umum.

*Perspektif teoritik kedua* yaitu teori bio-ekologi atau teori evolusi, pada perspektif evolusi ini ide-ide dari biologi dimasukkan dalam teori-teori sosial dan digunakan untuk menganalisis dinamika proses sosial. Beberapa teorinya adalah ekologi yang menekankan pada posisi sumber daya, kompetisi sumber daya, dan proses seleksi, sedangkan yang lain lebih biologik dan menggambarkan pandangan dari genetika dan kekuatan evolusioner untuk menjelaskan perilaku dan organisasi manusia.

Dalam perspektif kedua ini, teori-teori yang menjadi bagiannya di antaranya yang dikemukakan Herbert Spencer dengan prasenya *survival of the fittest*. Prase ini digunakan dalam *sense* moral dan filosofis, dia berpendapat bahwa bentuk terbaik dari organisasi sosial muncul dengan kompetisi di antara manusia yang tidak diatur, yang memungkinkan yang paling layak untuk bertahan. Hal yang mirip juga dikemukakan oleh Charles

Darwin dengan seleksi alamnya. Teori selanjutnya yaitu teori ekologi dan biologi yang menguraikan tentang seleksi alam dan genetik. Amos H. Hawleys mengemukakan tentang level makro dari teori ekologi seperti produksi, transportasi, dan komunikasi. Selanjutnya, ada teori urban dan teori ekologi organisasional.

Teori ekologi juga dikemukakan oleh J. Miller Mcpherson yang memberikan cara untuk memvisualisasikan hubungan kausal antara variabel dalam teori. Terakhir dalam perspektif adalah teori evolusi baru yaitu teori sosiobiologi dengan pendekatannya Piere van den Berghes yang mengemukakan tentang seleksi kerabat, paksaan, konseptualisasi proses kultural. Pendekatan Richard Machalek terkait dengan perbandingan lintas spesies dalam bentuk-bentuk sosial yang dilihat dari adanya kendala organismik, ekologi, biaya manfaat, dan sosiologi.

Gerhard Lenski dalam *Power and Previlage: A Theory of Social Stratification*, memberikan penjelasan tentang penekanan pada distribusi kekuasaan dan *previlage* dalam tipe-tipe sosial yang berbeda yang dilihat sebagai tahap-tahap sejarah evolusi yang panjang dari manusia yang diidentifikasi ada lima tahap: 1) masyarakat berburu dan berkumpul, 2) masyarakat hortikultura yang sederhana, 3) masyarakat hortikultura yang mahir, 4) masyarakat agraria, dan 5) masyarakat industri. Selanjutnya ada pendekatan evolusi Steven K sanderson untuk transformasi sosial. Regim biososiokultural sebagai suatu model yang dikemukakan oleh Lee Freese.

*Perspektif teoritik ketiga* yaitu teori konflik yang menguji sistem ketidaksetaraan yang secara sistematis menghasilkan konflik antara superordinat dan subordinat. Dalam perspektif konflik, teori konflik dalam sosiologi mulai dengan Karl Marx (1818-1883), tetapi pengembangan pada pertengahan abad dua puluh dilakukan oleh dua sosiologis awal Jerman yaitu Weber (1864-1920) dan George Simmel (1858-1918). Jadi, pemikiran teori konflik dari ketiga sosiologis inilah yang menjadi inspirasi pada pendekatan konflik kontemporer. Selanjutnya, ada Dahrendorf dengan Teori Dialektikal yang mengkritik fungsionalisme, Fungsionalisme Konfliknya Lewis Coser, Jonathan Turner dengan Teori Konflik Sintetik. Selain itu, ada Pendekatan Analitiknya Randall Collin yang masuk dalam Teori-teori Weberian dan juga Teori Ketidaksetaraan Gender dan Startifikasi.

*Perspektif teori keempat* yaitu teori pertukaran, yang memandang semua proses sosial antara individual dan kolektivitas aktor-aktor sebagai pertukaran dari sumber daya yang bernilai. Perspektif ini dimulai dengan Teori

Pertukaran dalam Ekonomi Klasik dengan pemikirnya Adam Smith dan dalam Antropologi dengan pemikirnya Sir James Frazer dan Bronislaw Malinowski dengan pertukaran materialnya. Levi Strauss dengan tiga prinsip pertukaran.

Dalam tradisi sosiologi juga ada teori pertukaran seperti dikemukakan oleh Marx yang mengaitkan teori pertukaran dengan konflik. Selanjutnya ada teori pertukarannya Simmel yaitu dalam *The Philosophy of Money* yang merupakan kritiknya terhadap nilai *Theory of Labor*nya Marx. Pendekatan Perilaku dari George C Homans juga masuk dalam perspektif ini dengan prinsip-prinsip pertukaran dasar dengan mengajukan formula  $action = value \times probability$ . Ada juga pendekatan dialektika yang dikemukakan oleh Peter M. Blau dengan pertukaran pada sistem elementari dan mempercayai bahwa perbedaan kekuasaan dalam kelompok menciptakan dua kekuatan yang kontradiktif yaitu tekanan terhadap integrasi dan tekanan terhadap oposisi dan konflik. Selanjutnya yang masuk perspektif ini yaitu pendekatan pertukaran jaringan kerjanya Richard M Emerson, Teori Pilihan Rasional, dan Teori Pertukaran Jaringan Kerja.

*Perspektif teori kelima* yaitu interaksionisme, merupakan label yang luas dan mencakup teori-teori pencarian untuk memahami dinamika pertemuan antar individu. Dalam perspektif ini nama filsuf George Herbert Mead menjadi yang terdepan pada pandangan Amerika awal. Ia mendapatkan inspirasi tentang teori interaksionisnya dari beberapa tokoh di antaranya dari William James, Charles Horton Cooley dengan *Analysis of Selfnya*, dan pragmatismenya John Dewey.

Mead sendiri mengemukakan sintetisnya dengan dua asumsi dasar yaitu 1) kelemahan biologikal tentang kekuatan organisasi manusia, kerjasamanya dengan yang lainnya dalam konteks kelompok untuk dapat bertahan, 2) tindakan-tindakan inter dan antara organisme manusia yang memfasilitasi kerjasamanya dan karena *survivenya* atau penyesuaiannya, akan disimpan. Pada pandangan awal Eropa terkait dengan perspektif interaksi ini ada nama Georg Simmel dengan analisis interaksi, Weber dengan analisis aksi sosial, dan Alfred Schultzt dengan interaksionisme fenomenologikal.

Selanjutnya ada interaksi simbolik dengan manusia sebagai pengguna simbolnya. Teori Diri dan Identitas dengan pemikirnya Sheldon Stryker yang berpandangan perilaku sosial manusia diorganisasikan oleh penunjukan simbolik pada seluruh aspek dari lingkungan, baik fisik maupun sosial. Sementara George P. Mccall dan J.L. Simmon juga dengan Teori

Identitasnya menekankan pada identitas peran dan dukungan peran. Identitas peran menjadi bagian rencana dan tujuan individu karena adanya legitimasi satu individu dalam pandangan yang lain yang selalu mengatur kekuatan dari perilaku manusia. Selanjutnya, ada pendekatan sintetik Randall Collins, pendekatan Dramaturgi dari Erving Goffman, Teori Emosi dalam Interaksi Sosial pemikirnya seperti Susan Shott, Sheldon Stryker, dan Randall Collin, dan terakhir *Expectation State Theory*.

*Perspektif keenam* adalah teori strukturalis, yang menekankan seluruh bidang sosial dipandu oleh pola-pola yang mendasari simbol-simbol budaya atau bentuk-bentuk relasi sosial. Dalam perspektif ini ada teori-teori Karl Marx terkait dengan *inequality*, Fungsionalismenya Durkheim, Gerg Simmel dengan Strukturalisme Formal. Pada interaksi dan mikrostrukturalisme ada pandangan Mead tentang Strukturalisme Perilaku, Schutz dengan Strukturalisme Fenomenologikal. Tradisi struktural Perancis diwakili oleh Levi-Strauss, tradisi Struktural Amerika dalam psikologi sosial diwakili oleh pemikiran Jacob Moreno dan Teknik Sosiometriknya. Selanjutnya ada Teori Strukturasinya Anthony Giddens, Teori Kultural dengan Analisis Kulturalnya Robert Wuthnow, Strukturalisme Konstruktivis yang diwakili oleh Pierre Bourdieu, dan Teori Makro Struktural yang dikemukakan oleh Peter m. Blau.

*Perspektif ketujuh* atau terakhir yaitu teori kritis yang tujuan dari teori ini adalah digunakan untuk mengkritik tidak hanya bagaimana cara dunia sosial diatur, tetapi juga berupa gagasan bahwa ilmu merupakan suatu cara yang berguna untuk memahami dunia sosial. Pada perspektif ini pemikiran Marx juga menjadi salah satu yang penting selain Pesimismenya Webber, pemikiran Simmel yang menyerang pemikiran Marx. Selanjutnya ada Jurgen Habermas dengan Analisis Ruang Publiknya, Krisis Legitimasi dalam Masyarakat, dan Teori Aksi Komunikasi. Teori Feminis Kritis, Teori Postmodernisme dengan salah satu pemikirnya Jean-Francois Lyotard, Richard Harvey Brown, dan Charles C. Lemert.

Demikian pembahasan tentang Pengantar Sosiologi Pemerintahan, yang dimaksudkan untuk menjadi pembuka jalan bagi Saudara agar dapat memahami dan menangkap materi-materi pada modul selanjutnya. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal berikut.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ada dua rumpun ilmu yang besar dan dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Jelaskan dan bagaimana dengan ilmu pemerintahan dan sosiologi?
- 2) Setiap ilmu pengetahuan memiliki sasaran yang akan ditelitinya baik oleh ilmu tersebut maupun bersama-sama dengan ilmu lainnya. Jelaskan!
- 3) Berikan penjelasan singkat terhadap salah satu konsep dasar dalam sosiologi!
- 4) Menurut Colnns, dalam sosiologi itu ada 4 tradisi. Jelaskan!
- 5) Selain tradisi sosiologi juga dibangun oleh teori-teori yang juga disebutnya dengan perspektif seperti dikemukakan Turner, salah satunya perspektif strukturalis. Jelaskan perspektif tersebut!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Secara umum ada 2 rumpun ilmu yang besar dalam ilmu pengetahuan yaitu ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Kedua ilmu tersebut jelas berbeda dan bertolak belakang secara cukup tajam misalnya pendekatan dan paradigma dalam pencarian ilmu tersebut karena yang satu sudah pasti positivis sedangkan yang satunya bisa positivis dan/atau pospositivis. Oleh karena itu, tidak bisa kita menggunakan derajat ke ilmuwan suatu ilmu dengan menggunakan batasan dari rumpun ilmu yang berbeda. Ilmu pemerintahan dan sosiologi didasarkan pada objek kajiannya, termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial.
- 2) Kata sasaran identik dengan tujuan. Oleh karena itu, sasaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang hendak dituju. Dalam ilmu pengetahuan pun, istilah ini dapat kita jumpai bahkan memiliki kedudukan yang utama karena akan menjadi pembeda dengan ilmu-ilmu yang satu rumpun. Sasaran itu nantinya akan menjadi basis bagi ilmu ketika digunakan sebagai cara pandang atau perspektif. Sasaran suatu ilmu ada dua yaitu sasaran pokok dan sasaran sampingan. Sasaran pokok pada dasarnya menjadi bidang yang dikaji oleh satu rumpun ilmu, misalnya untuk rumpun ilmu sosial sasaran pokoknya yaitu realitas sosial yang

terkait dengan kehidupan sosial dan segala aktivitas yang dilakukan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok sosial sebagai gejala-gejala sosial.

- 3) Ada banyak konsep dasar dalam sosiologi, salah satu konsep yang utamanya yaitu struktur sosial. Konsep ini sering kali digunakan untuk menjelaskan relasi yang terbangun dalam kehidupan sosial manusia dengan masyarakat, antara masyarakat dengan lingkungannya, masyarakat dengan pemimpinnya atau pemerintahnya dan lain-lain. Salah satu jenis struktur sosial yang juga seolah melekat dengan sosiologi adalah stratifikasi sosial karena ia merupakan struktur sosial vertikal. Dalam ranah pemerintahan, kita dapat menemukan relasi yang kuat antara struktur sosial ini dengan gejala pemerintahan yang timbul karena eksistensinya, contoh utamanya yaitu tentang hubungan antara pemerintah dalam stratifikasi sosial tertentu dengan yang diperintah dalam stratifikasi yang lain.
- 4) Randall Collins (1994) membagi sosiologi ke dalam empat tradisi besar yaitu tradisi konflik, yang beberapa poin utamanya dikemukakan oleh Karl Marx sebagai tokoh utama tradisi konflik; Tradisi rasional/utilitarian, tradisi ini sangat memiliki kedekatan dan berhubungan dengan disiplin ekonomi; Tradisi Durkheim. Collin membagi Tradisi Pemikiran Durkheim dalam dua pandangan yang berhubungan dengan penekanan makro atau mikro; dan terakhir tradisi mikrointeraksionis merupakan perspektif utama yang paling umum menganalisis saling ketergantungan antara kesadaran subjektif dan pola-pola interaksi di tingkat mikro.
- 5) Dalam bukunya Jonathan H. Turner, dan kawan-kawan disebutkan adanya 7 perspektif dalam sosiologi salah satunya perspektif atau Teori Strukturalis. Teori ini menekankan *bahwa* seluruh bidang sosial dipandu oleh pola-pola yang mendasari simbol-simbol budaya atau bentuk-bentuk relasi sosial. Dalam perspektif ini ada teori-teori Karl Marx terkait dengan inequality, Fungsionalismenya Durkheim, Gerg Simmel dengan Strukturalisme Formal. Pada interaksi dan mikrostrukturalisme ada pandangan Mead tentang Strukturalisme Perilaku, Schutz dengan Strukturalisme Fenomenologikal. Tradisi struktural Perancis diwakili oleh Levi-Strauss, tradisi Struktural Amerika dalam psikologi sosial diwakili oleh pemikiran Jacob Moreno dan Teknik Sosiometriknya. Selanjutnya, ada Teori Strukturasinya Anthony Gidden, Teori Kultural

dengan Analisis Kulturalnya Robert Wuthnow, Strukturalisme Konstruktivis yang diwakili oleh Pierre Bourdieu, dan Teori Makro Struktural yang dikemukakan oleh Peter m. Blau.



## RANGKUMAN

---

Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek ilmunya sendiri. Ada dua jenis objek yaitu objek material dan formal. Objek materia merupakan sasaran atau bahasan kajian secara material yang menjadi perhatian suatu ilmu. Objek materian suatu ilmu dapat sama dengan ilmu lainnya. Sementara, objek formal atau *focus of interest* merupakan cara pandang atau perspektif suatu ilmu terhadap objek yang menjadi sasaran pokoknya.

Selain ada objek yang dikajinya, suatu ilmu yang sudah matang dan mandiri seperti sosiologi, memiliki konsep-konsep dasar yang akan digunakan ketika hendak menjelaskan gejala sosial yang telah menjadi fakta dan realitas sosial. Terkait dengan relasinya dengan ilmu pemerintahan dan nantinya membentuk sosiologi pemerintahan, ada beberapa konsep sosiologi yang sedikit banyak memiliki kaitan dengan ilmu pemerintahan dan dapat digunakan untuk menjelaskan gejala, fakta, dan realitas pemerintahan. Konsep tersebut di antaranya struktur sosial, hierarki sosial, kekuasaan, dan lain-kain.

Teori pun menjadi hal yang penting lainnya bagi suatu ilmu karena hal tersebut merupakan unsur yang akan membuat ilmu menjadi lebih matang dan mandiri seperti halnya sosiologi. Banyak teori yang sudah dihasilkan dan menjadi basis dalam mengembangkannya. Teori tersebut pada akhirnya menjadi suatu perspektif. Perspektif yang dimaksud yaitu teori fungsional, eko-biologi, teori konflik, teori pertukaran, interaksionisme, strukturalis, dan kritis.



## TES FORMATIF 1

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Bila merujuk pada pandangan Kerlinger, ilmu memiliki sifat ....
  - A. statis dan dinamis
  - B. alamiah dan non alamiah
  - C. alamiah dan sosial
  - D. formal dan informal

- 2) Dalam khasanah ilmu pengetahuan, sasaran dan titik dalam sasaran tersebut disebut objek ilmu pengetahuan yang terdiri dari ....
  - A. objek dan subjek material
  - B. objek material dan formal
  - C. subjek formal dan material
  - D. subjek formal dan objek material
  
- 3) Pada perkembangannya, sosiologi dibagi ke dalam beberapa tradisi seperti dijelaskan Collins yaitu ....
  - A. Konflik, Rasional, Durkheim, dan Interaksionisme
  - B. Marx, Rasional, Durkheim, Interaksionisme
  - C. Marx, Rasional, Utilitarian, Interaksionisme
  - D. Konflik, Rasional, Utilitarian, Interaksionisme
  
- 4) Di antara tradisi tersebut ada yang menganalisis saling ketergantungan antara kesadaran subjektif dan pola-pola interaksi di tingkat mikro. Tradisi yang dimaksud yaitu ....
  - A. Rasional
  - B. Utilitarian
  - C. Fungsional
  - D. Mikrointeraksionisme
  
- 5) Selain tradisi, dalam sosiologi juga ada teori-teori di antaranya teori/perspektif yang menekankan bahwa seluruh bidang sosial dipandu oleh pola-pola yang mendasari simbol-simbol budaya atau bentuk-bentuk relasi sosial. Teori/Perspektif yang dimaksud adalah ....
  - A. konflik
  - B. strukturalis
  - C. fungsional
  - D. interaksionisme

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Batasan Konseptual  
Sosiologi Pemerintahan**

Pada Kegiatan Belajar 1, kita telah membahas sosiologi sebagai salah satu perspektif dalam ilmu sosial. Bagi mahasiswa yang sudah berhasil mengkajinya, tentu saja akan dengan mudah memahami dan menerima pentingnya posisi sosiologi dalam mengkaji pemerintahan karena hakikatnya pemerintahan dengan segala persoalan pemerintahannya yang saling memengaruhi merupakan realitas sosial. Bagi ilmu pemerintahan sendiri sebagai salah satu ilmu pengetahuan dan sama-sama dengan sosiologi termasuk dalam rumpun ilmu sosial, penggunaan sosiologi sebagai salah satu perspektif akan menambah kematangannya. Apalagi secara faktual objek kajian ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu sosial relatif sama yaitu realitas sosial terkait dengan kehidupan masyarakat dan segala persoalannya. Dengan demikian, sosiologi memiliki kedudukan yang penting bagi pemerintahan baik sebagai suatu aktivitas yang dijalankan pemerintah dalam suatu negara maupun sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (masyarakat).

Untuk Kegiatan Belajar 2 ini, pembahasan akan difokuskan pada pencarian batasan etimologis dan konseptual tentang sosiologi pemerintahan. Sampai saat ini cukup sulit menemukan literatur yang komprehensif baik yang secara langsung maupun tidak langsung membahas sosiologi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam pencarian dan pengkajian batasan konseptualnya akan meminjam kajian dari sosiologi politik. Pertimbangannya tentu saja selain literatur yang membahasnya relatif sudah banyak baik yang ditulis oleh ahli dari luar maupun dari dalam negeri, juga karena secara psikologis ilmu politik dengan ilmu pemerintahan memiliki “ikatan batin” yang kuat.

Untuk mengawali pembahasannya mari kita coba kaji kembali hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan sosiologi. Mudah-mudahan setelah mengkajinya, dapat membantu Saudara dalam memahami keterkaitan sosiologi pemerintahan dengan sosiologi politik.

## A. RELASI ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU POLITIK DAN SOSIOLOGI

Dari berbagai literatur modern dan tentu saja dalam perspektif politis, ilmu pemerintahan sering kali dianggap sebagai cabang ilmu politik karena ilmu politik dianggap lebih tua. Namun, kalau merujuk pada penjelasan tentang karya Plato yaitu *Politeia*, yang berasal dari kata *polis* dan berarti kota yang kemudian diartikan pula sebagai negara maka (ilmu) pemerintahan dapat dikatakan justru lebih dahulu ada karena menjadi fokus perhatian dan pembahasan Plato dan juga Aristoteles.

Surianingrat (1990) menjelaskan bahwa yang dibicarakan oleh Plato terkait *polis* sebagai kota atau kekotaan bukanlah keseluruhan unsur yang secara tradisional menjadi pembentuk kota yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan karena yang dibahasnya hanya unsur yang ketiga saja. Menurutnya *politeia* itu lebih tepat diartikan dengan term pemerintahan kota. Begitu pun dengan karyanya yang lain *politikos* mengarah pada aspek pemerintahan karena yang dibahas adalah tentang pemerintahan dan kepemimpinan *polis*. Adapun karya Aristoteles, *politica*, mengandung arti suatu bentuk pemerintahan yang terdiri dari sejumlah orang yang sebagian besar berasal dari rakyat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak mementingkan kepentingan pribadinya selain mengabdikan pada masyarakat dan mengurus kepentingan umum. Atas dasar pemikiran tersebut, Surianingrat berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari tentang *polis* disebut ilmu ke-*polis*-an atau ilmu pemerintahan.

Memasuki zaman modern istilah *polis* berubah menjadi politik, politikus, *politic* dan sebagainya. Lebih malangnya lagi menurut Surianingrat (1990), ilmu yang mengkaji pemerintahan *polis* ini oleh sebagian ahli dinamakan dengan ilmu kenegaraan atau ilmu tentang negara karena *polis* diartikan dengan kata negara. Hal ini dapat dilihat pada karya Von Schmid yang menyadur buku Plato, *Politeia*, dengan judul "*De Staat*" (*Negara*), sedangkan George Sabine dan juga Field menerjemahkan *politeia* dalam karya mereka menjadi *Republic*. Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, pengertian *polis* ini menurutnya lebih banyak diterjemahkan dengan negara atau politik yang tidak sama dan identik dengan pemerintahan. Ilmu tentang ke-*polis*-an ini sekarang lebih dikenal dan dinamakan dengan ilmu politik dan BUKAN ilmu pemerintahan.

Walaupun tidak sama dan tidak identik, tetapi ilmu pemerintahan yang tetap berkembang ternyata memiliki kesamaan dalam hal objek yang dikajinya dengan ilmu politik. Tidak hanya secara umum, sebagaimana telah disinggung di awal pada materi Kegiatan Belajar 1 bahwa objek yang dikaji oleh ilmu sosial itu sama, yaitu realitas sosial khususnya terkait dengan kehidupan sosial masyarakat manusia yang cenderung selalu berubah, tetapi juga secara khusus ada objek yang dikaji secara bersama baik oleh ilmu pemerintahan maupun ilmu politik.

Dengan kedudukannya sebagai salah satu ilmu pengetahuan dalam rumpun ilmu sosial maka sasaran atau objek kajian ilmu pemerintahan bukanlah benda atau objek yang dapat terlihat dengan indra. Secara khas objek kajiannya yaitu gejala-gejala sosial yang ada kaitannya atau hubungannya dengan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa sasaran ilmu pemerintahan adalah gejala-gejala pemerintahan. Gejala pemerintahan yang dimaksud di antaranya menyangkut segala kegiatan, aktivitas, tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan Dana Desa, secara langsung dan tidak langsung membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dari penjelasan di atas ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji segala kegiatan, aktivitas, tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara.

Dalam buku Surianingrat, dijelaskan bahwa beberapa ahli merumuskan tentang definisi ilmu politik seperti yang dikemukakan oleh Maymond Garfield Gettel dalam bukunya *Political Science* (Surianingrat, 1990:53) yang berpendapat bahwa definisi ilmu politik sebagai

Ilmu politik dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang negara, Ilmu yang mengenai perkumpulan manusia yang membentuk kesatuan politik dengan organisasi pemerintahannya, dan dengan aktivitas pemerintahan ini dalam membuat dan mengadministrasikan hukum dan dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam negeri. Hal pokok yang menjadi perhatian utamanya yaitu negara, pemerintah, dan hukum.

Sedangkan J. Barent dalam bukunya *De Wetenschap der Politiek* (Surianingrat, 1990:54) mengartikan ilmu pengetahuan politik adalah “ilmu yang mempelajari tentang negara”.

Para ahli tersebut, termasuk Mac Iver, berpandangan rumusan yang mereka susun merupakan ilmu politik dengan pusat perhatiannya atau titik bidiknya pemerintahan. Namun menurut Surianingrat, rumusan tersebut sesungguhnya juga sedang membahas atau merumuskan ilmu pemerintahan dan bahkan Mac Iver dalam bukunya *The Web of Government* sedang berupaya merumuskan batasan ilmu pemerintahan (*the science of government*). Oleh karena itu, Surianingrat berpendapat bahwa fokus yang dikaji ilmu politik seperti yang dikemukakan para ahli itu dapat diklaim atau dikaji juga oleh ilmu pemerintahan dengan titik bidiknya tentu saja ilmu politik.

Dengan sosiologi sebagai sama-sama termasuk dalam rumpun ilmu sosial, ilmu pemerintahan memiliki objek kajian yang sama yaitu realitas sosial berkenaan dengan kehidupan sosial manusia dalam relasinya dengan masyarakat. Dibanding dengan ilmu politik yang kini lebih mengarah pada pengkajian terhadap cara-cara memperoleh kekuasaan oleh para pelaku politik (di dalamnya termasuk rakyat atau masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama), sosiologi lebih dekat dengan ilmu pemerintahan.

Seerti telah dikemukakan, dalam kedudukannya sebagai yang diperintah, masyarakat menjadi titik bidik atau fokus bahasan dari ilmu pemerintahan. Pembahasan pada “yang diperintah” tidak hanya sebatas relasinya dengan pemerintah. Di antaranya ketika masyarakat berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, baik yang sifatnya strategis seperti mengajikan ide atau gagasan pada saat pengambilan keputusan atau perumusan dan evaluasi kebijakan maupun hanya sebatas pada keikutsertaannya dalam pelaksanaan kebijakan dan menikmati hasil-hasil setelah kebijakan dilaksanakan.

Kajian juga tidak secara keseluruhan atau pun yang hanya terfokus pada tindakan dan kehidupan individu dan kelompok serta korelasinya dengan masyarakat. Realita sosial seperti kemiskinan, ketidakberdayaan, dan bahkan konflik dalam masyarakat sekalipun menjadi fokus kajian ilmu pemerintahan. Dalam hal ini yang dikajinya adalah segala kegiatan, aktivitas, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut (gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat) dan pengaruhnya baik secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah.

Sosiologi sendiri secara sederhana diartikan sebagai suatu kajian atau studi tentang masyarakat atau seperti dikemukakan Calhoun et.al (1994)

merupakan ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosiologi berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat, organisasi sosial, kelembagaan, interaksi, dan masalah-masalah sosial. Sementara Shadily (1993) mendefinisikannya sebagai:

ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya (tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan dan masyarakatnya), dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, antar agamanya, tingkah laku serta keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala kehidupannya terhidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan itu.

Batasan dari sosiologi modern juga menunjukkan adanya kesamaan bahwa sosiologi itu sebagai studi yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat yang dikemukakan oleh Giddens (2004). Dalam analisis sosiologi, Comte dan Spencer seperti dikutip Rush dan Philip Antlop (2005), memandang masyarakat itu sebagai unit dasar dan berbagai kelembagaan sosial termasuk di dalamnya relasi yang terbangun di antara lembaga-lembaga tersebut merupakan unit-unit dari analisis sosiologi.

Dari uraian di atas, jelas bahwa baik ilmu pemerintahan dengan sosiologi sama-sama menjadikan masyarakat sebagai salah satu objek kajiannya. Namun, tetap berbeda dalam mengkajinya karena disesuaikan dengan sudut pandang sendiri-sendiri. Namun karena pengkajian terhadap masyarakat tidak seluas sosiologi dan juga karena sosiologi lebih dulu berkembang sebagai suatu ilmu pengetahuan, maka tidak menjadi hal yang salah kalau ilmu pemerintahan meminjam berbagai konsep dan teori dari sosiologi khususnya yang ada kaitannya dengan perspektif ilmu pemerintahan untuk digunakan sebagai alat analisisnya. Dengan kata lain dalam mengkaji fenomena-fenomena atau gejala-gejala pemerintahan itu, ilmu pemerintahan melakukannya dengan pendekatan sosiologis.

## **B. MENDEFINISIKAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Literatur yang membahas tentang sosiologi pemerintahan relatif masih sangat kurang dibanding sosiologi politik. Namun, bukan berarti bahwa sosiologi pemerintahan tidak dikenal dalam khazanah ilmu pengetahuan karena berdasarkan pendapatnya Surianingrat (1990) sosiologi pemerintahan

itu merupakan cabang dari ilmu pemerintahan sama halnya dengan etika pemerintahan, psikologi pemerintahan, administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah dan lain-lain. Adanya pencabangan atas ilmu pemerintahan ini didasarkan pada keterbatasan ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu lainnya yang hanya mampu mempelajari satu atau sekelompok segi saja dari sasaran yang dijadikan sebagai titik bidiknya. Segi-segi lainnya yang tidak menjadi titik bidik ilmu pemerintahan dapat menjadi titik bidik ilmu lainnya termasuk sosiologi. Namun, di antara titik bidik masing-masing ilmu tersebut ada yang menjadi titik bidik bersama yang terkesan menjadikan kedua ilmu itu menjadi *overlapping* (tumpang tindih).

Pada titik bersama itulah kedua ilmu saling memberi warna untuk masing-masing kajiannya. Bagi ilmu pemerintahan, kajian yang mempelajari titik bersama tersebut diberi nama sosiologi pemerintahan. Dalam bekerjanya kajian menggunakan pendekatan sosiologis untuk menganalisis gejala-gejala pemerintahan. Oleh karena itu, sosiologi pemerintahan dapat dimaknai sebagai studi yang menggunakan perspektif sosiologis untuk menganalisis gejala-gejala pemerintahan atau dapat juga didefinisikan sebagai studi yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan (berupa semua aktivitas, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara) secara sosiologis.

Sebagai perbandingan dan sekaligus rujukan untuk memperkuat batasan konseptual sosiologi pemerintahan, mari kita bahas tentang definisi sosiologi politik. Maurice Duverger (2005) mengemukakan adanya 2 (dua) pandangan terkait sosiologi politik ini. *Pertama*, sosiologi politik sebagai ilmu negara. Definisi ini didasarkan pada pandangan politik yang dikonotasikan dengan negara dan negara sendiri yang dibatasi hanya pada sekelompok manusia atau masyarakat. *Kedua*, batasan sosiologi politik yang didasarkan pada konsepsi Leon Duguit terkait perbedaan pemerintah (*governments*) dan yang diperintah (*governers*) sebagai fakta yang mendasar atau fundamental dalam suatu kelompok sosial pada setiap arasnya. Dalam pandangannya, setiap kelompok terlepas dari besar atau kecilnya, tetap atau sementara sifatnya, akan terbagi pada dua pihak yaitu mereka yang memerintah atau memberi perintah dan mereka yang diperintah atau yang harus melaksanakan perintah tersebut, ada yang membuat keputusan dan mematuhi keputusan itu. Berdasarkan fakta tersebut, Sosiologi politik diartikan sebagai ilmu tentang

kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia.

Kalau dilihat dari fokus pembahasannya, definisi yang kedua lebih “politis” dibanding yang pertama. Duverger (2005) juga ternyata lebih menaruh perhatian pada definisi yang kedua dan memberikan pembahasannya yang lebih dalam dengan menjelaskan kaitan cakupan kekuasaan dengan masyarakat yang didasarkan pada besar atau kecilnya kelompok (kelompok elemeneter dan kelompok kompleks) dan ikatan-ikatan organisatorisnya (masyarakat swasta dan masyarakat universal). Dari perhatiannya yang besar pada hubungan kekuasaan dan masyarakat tersebut, Duverger sampai pada kesimpulan bahwa sosiologi politik itu karena menaruh perhatian pada objek yang sama yaitu kekuasaan identik dengan ilmu politik.

Pendapat lain terkait batasan sosiologi politik ini dikemukakan oleh ahli politik Rush dan Althoff (2005). Dengan basis politiknya tentu saja Rush dan Althoff tidak sependapat kalau ilmu politik disamakan dengan sosiologi politik apalagi dianggap sebagai cabang sosiologi. Bagi keduanya, bidang kajian politik yang dibahas oleh para sosiolog dan disebut sosiologi politik tidak berarti bahwa sosiologi politik menjadi cabang sosiologi. Marx, Weber, Mosca, Pareto yang memberi perhatian pada kekuasaan diakui oleh keduanya hanya sebatas mengkaji kekuasaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Oleh karena itu, sosiologi politik menjadi bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Singkatnya sosiologi politik adalah bidang kajian yang menganalisis fenomena politik (kekuasaan) secara sosiologis.

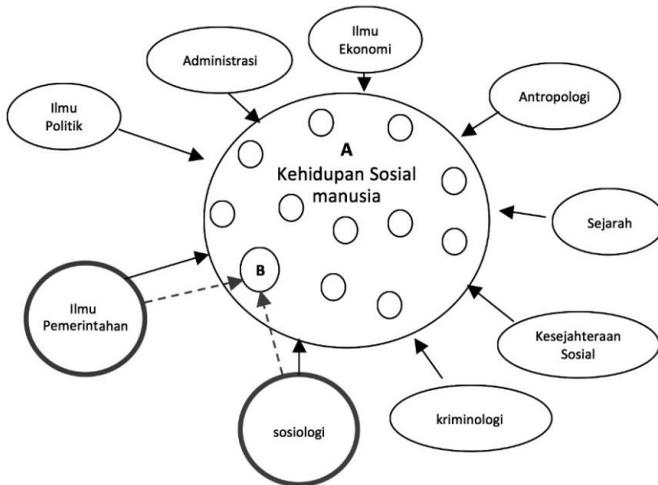
Dari penjelasan sosiologi politik di atas, ada benang merah yang dapat ditangkap yang dapat digunakan untuk membahas atau mendefinisikan sosiologi pemerintahan. Dengan dekatnya relasi antara ilmu pemerintahan dengan politik dan juga dengan sosiologi, mendefinisikan sosiologi pemerintahan sebagai studi yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan (berupa semua aktivitas, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara) secara sosiologis menjadi logis karena sesuai dengan alur pikir yang seharusnya.

Seperti halnya ilmu politik dan sosiologi yang mempunyai objek material dan formal, ilmu pemerintahan pun memiliki kedua objek tersebut. Dengan posisinya yang sama sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial, maka

sudah pasti ketiganya memiliki objek kajian material yang sama yaitu realitas sosial dalam hal ini terkait dengan kehidupan sosial manusia. Namun, akan menjadi berbeda ketika kita membicarakan objek formalnya karena ketiga ilmu tersebut memiliki sudut pandang masing-masing. Objek formal atau *focus of interest* adalah sudut pandang yang digunakan tiap ilmu terhadap suatu objek material dalam hal ini kehidupan sosial manusia.

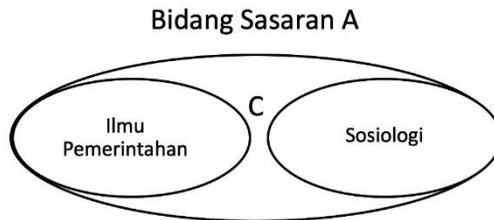
Dalam perkembangan selanjutnya, pada objek material itu muncul sub-sub objek material dan menjadi objek material bagi dua atau lebih ilmu pengetahuan. Sebagai contoh masyarakat, ia merupakan sub objek material dari kehidupan sosial manusia sebagai objek materialnya. Masyarakat ini kemudian menjadi objek material bersama antara ilmu pemerintahan dan sosiologi. Di sinilah mulai terpikirkan untuk membentuk suatu studi atau kajian baru yang dihasilkan melalui hibridisasi ilmu pengetahuan antara ilmu pemerintahan dengan sosiologi yaitu sosiologi pemerintahan. Jika divisualkan maka pembentukan sosiologi pemerintahan dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:

Dari gambar tersebut, bidang A (kehidupan sosial manusia) merupakan objek material ilmu-ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Sementara bidang B, merupakan sub objek material dari bidang A (kehidupan sosial manusia). Namun, bidang B ini ternyata menjadi objek material secara bersama untuk ilmu pemerintahan dan sosiologi.



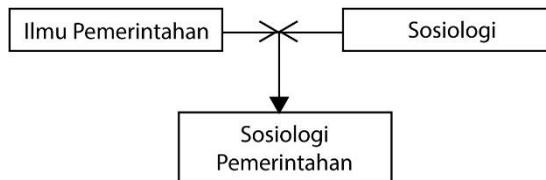
Gambar 1.3  
Realitas Sosial Sebagai Objek Material Rumpun Ilmu Sosial

Sebagaimana telah dijelaskan, bidang kajian ilmu sosial memiliki banyak segi, sedangkan satu ilmu (ilmu pemerintahan) hanya mampu mengkaji satu atau beberapa segi saja yang ada dalam bidang sarannya (B, yang merupakan objek material). Oleh karena itu, segi yang lain pada bidang sasaran yang sama (B) dapat dikaji ilmu yang lainnya (sosiologi). Namun ternyata, pada bidang sasaran tersebut (B) ada segi lain masih dapat dikaji oleh masing-masing ilmu (C), tetapi akan lebih tepat jika dalam pengkajiannya dilakukan secara bersama-sama. Secara sederhana penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.4**  
Bidang Kajian Bersama Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi

Kondisi tersebut akan melahirkan cabang ilmu dan kalau meminjam konsep di dunia pertanian cabang ilmu ini merupakan hasil proses persilangan (hibridisasi) antara ilmu pemerintahan dan sosiologi. Cabang ilmu yang dimaksud yaitu sosiologi pemerintahan dan bidang C menjadi kajiannya. Ilustrasi berikut mudah-mudahan dapat memberikan sedikit bayangan terhadap penjelasan di atas.



**Gambar 1.5**  
Hibridisasi Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi

Persoalan yang kemudian muncul adalah sosiologi pemerintahan ini cabang ilmu pemerintahan atau sosiologi. Klaim terhadap pencabangan sosiologi pemerintahan tidak boleh terjadi seperti pada sosiologi politik. Sebagaimana telah dikemukakan di awal tulisan, sosiologi politik dianggap oleh sebagian sosiolog merupakan cabang sosiologi. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya sosiolog dari mulai zaman klasik sampai modern ternyata juga menaruh perhatian secara mendalam pada gejala politik. Klaim sosiologi tersebut mendapat penentangan dari para ahli ilmu politik (seperti Rush dan Althoff). Namun, apakah penentangan itu sekaligus juga menyatakan bahwa sosiologi itu cabang ilmu politik, bisa juga demikian.

Hal berbeda ketika kita membicarakan sosiologi pemerintahan. Pandangan sosiolog terhadap sosiologi pemerintahan berbeda pada sosiologi politik, sehingga sosiologi politik sudah jauh berkembang dibanding sosiologi pemerintahan. Para sosiolog pada masa klasik itu mungkin kurang begitu memperhatikan atau bahkan tidak tertarik untuk mengkaji gejala-gejala pemerintahan. Artinya, gejala politik jauh lebih menarik dan hal tersebut tidak dapat disalahkan mengingat topik kekuasaan dan perebutannya di berbagai aras kelompok sosial memang lebih menarik. Namun, dapat juga ada kekeliruan, justru selama ini ketika mereka membahas negara, kekuasaan, elit, dan lain-lain **bukan** dalam kerangka dan konteks politik, **tetapi** pemerintahannya. Hanya saja para ahli, seperti telah dijelaskan, memaknai *polis* (*politeia* dan *politicos*) itu lebih dominan ke arah politik dan negara bukan pemerintahan. Beberapa ahli memang memberikan batasan bahwa ilmu politik ialah ilmu tentang negara padahal tidak semua perumusan ilmu politik menggunakan negara sebagai titik bidiknya. Pada akhirnya, yang mengemuka adalah sosiologi politik dan bukan sosiologi pemerintahan.

Untuk saat ini bagi sosiologi pemerintahan, walaupun Surianingrat (1990) mengemukakan bahwa sosiologi pemerintahan ini cabang ilmu pemerintahan, masalah klaim atas dirinya lebih baik dikesampingkan. Sebagai studi hasil hibridisasi, kedua ilmu induk yaitu ilmu pemerintahan dan sosiologi, memiliki hak yang sama untuk menjadikan sosiologi pemerintahan sebagai cabang ilmu masing-masing. Hal penting yang seharusnya kini menjadi perhatian adalah memperkuat dan mengembangkan derajat keilmuannya.

Kesempatan untuk memperkuat dan mengembangkan sosiologi pemerintahan untuk menjadi studi yang matang sebetulnya sangatlah besar. Hal ini terkait dengan catatan sejarah keilmuannya yang sesungguhnya

sudah menjadi fokus pembahasan para ilmuwan dalam karya-karyanya. Pada masa Yunani Kuno, Romawi dan juga pada masa klasik dan pertengahan di dunia Islam, para ahli pikirnya menggunakan berbagai konsep dan teori yang mengandung sifat sosiologi pemerintahan sebagai alat mengkaji persoalan manusia dan relasinya dengan gejala sosial lainnya.

Sebagai contoh kita dapat mempelajari pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, Abi Rabi', Farabi, dan Ibnu Khaldun yang merupakan sebagian ahli pikir yang mengkaji terbentuknya negara dan pemerintahan dengan mengaitkannya pada persoalan kehidupan manusia, hasrat manusia, dan juga karena kesadarannya pada keterbatasan yang dimilikinya untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Keputusannya untuk hidup bersama, berkelompok, bermasyarakat dan bernegara merupakan konsekuensi atas kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, menjadi persoalan yang akan lebih tepat untuk dikaji oleh sosiologi pemerintahan bukan oleh ilmu politik, sosiologi, ataupun ilmu pemerintahan walaupun karya-karya mereka membahas pemerintahan kota atau pemerintahan negara (Pembahasan secara komprehensif dapat dibaca pada Modul Kedua dari Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan).

Persoalan lain yang juga perlu untuk diperhatikan adalah keseriusan dari ilmu pemerintahan dan sosiologi dalam membantu mengembangkan dan memperkuat keilmuannya. Parameter untuk hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari muatan kurikulum pada masing-masing Program Studi atau Jurusan keduanya. Dari hasil penelusuran, sosiologi pemerintahan menjadi mata kuliah mandiri hanya di jurusan atau program studi ilmu pemerintahan, sedangkan program studi sosiologi memilih sosiologi politik bukan sosiologi pemerintahan yang akan diajarkan pada mahasiswanya. Namun sayangnya, hanya Universitas Diponegoro, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Terbuka yang menjadikan sosiologi pemerintahan menjadi bagian kurikulum di jurusan atau program studi ilmu pemerintahannya.

Dari penjelasan di atas, ilmu pemerintahan tampaknya lebih serius dibanding sosiologi dalam memperkuat dan mengembangkan sosiologi pemerintahan sebagai suatu kajian. Klaim Surianingrat (1990) bahwa Sosiologi Pemerintahan sebagai cabang ilmu pemerintahan, untuk sementara dapat kita terima, tentu saja sebelum sosiologi juga melakukan klaim atasnya.

### C. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Sebelum membahas ruang lingkup sosiologi pemerintahan, mari kita telaah kembali terkait batasan konseptualnya. Sosiologi pemerintahan dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan (berupa semua aktivitas, kegiatan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara) secara sosiologis.

Sekilas tentunya batasan konseptual sosiologi pemerintahan itu hampir sama dengan ilmu pemerintahan. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari segala aktivitas, kegiatan, perbuatan dan perilaku pemerintahan dalam mengelola kekuasaan baik bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan dalam hubungannya dengan yang diperintah. Berbagai aktivitas, kegiatan, perbuatan dan perilaku pemerintah yang terbangun dalam hubungannya dengan yang diperintah tersebut di antaranya mengatur dan membuat kebijakan, memimpin, melayani, melindungi, membina, dan memajukan tingkat kehidupan pihak yang diperintah (masyarakat). Selain itu, dalam hubungan tersebut juga ada hubungan antar kelembagaan pemerintah karena dalam arti yang sempit pun pemerintah tetaplah tidak dibangun oleh satu organisasi atau lembaga. Dalam mewujudkan hubungan tersebut, terdapat juga perbuatan pemerintah lainnya yaitu kerja sama pemerintah dengan kelembagaan lainnya.

Perbedaan batasan sosiologi pemerintahan dengan ilmu pemerintahan ada pada penggunaan perspektif sosiologis dalam mengkaji gejala-gejala pemerintahan baik yang memang menjadi kajian ilmu pemerintahan maupun yang secara khusus menjadi titik bidik atau bidang kajian sosiologi pemerintahan. Dalam batasan yang pertama (menggunakan perspektif sosiologi), sosiologi hanya memberi “warna” saja pada analisis ilmu pemerintahan terhadap gejala-gejala pemerintahan. Artinya, konsep dan teori yang utama dalam menganalisis gejala pemerintahan tetap berasal dari ilmu pemerintahan, sedangkan konsep dan teori dari sosiologi menjadi unsur pendukung saja.

Dari penjelasan di atas, kita dapat menemukan dan menetapkan ruang lingkup sosiologi pemerintahan. Namun, perlu juga kita mencoba untuk mengacu pada ruang lingkup ilmu pemerintahan supaya lebih terarah. Selain

itu juga karena dari hasil penelusuran, sosiologi pemerintahan ini hanya diberikan di jurusan atau program studi ilmu pemerintahan. Ruang lingkup ilmu pemerintahan sendiri kalau merujuk pada pendapatnya Soltau dan juga Gilchrist seperti dikutip Surianingrat (1990:60) sebagai berikut:

1. *The government as it is* (Pemerintahan menurut keadaannya sekarang); analisa dan penulisan mengenai pemerintahan, asal mula pemerintahan, unsur-unsur pemerintahan, beraneka ragam pemerintahan dalam praktik dan perkembangannya.
2. *The government as it has been* (Pemerintahan sebagaimana yang lalu); ini merupakan penulisan tentang pemerintahan pada waktu yang silam. Dengan kata lain sejarah pemerintahan.
3. *The government as it should be* (Pemerintahan sebagaimana harusnya); pemerintahan dianalisis fungsinya, dicari prinsip-prinsipnya bagaimana agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang memengaruhi kelancaran pemerintahan diteliti dan dipelajari.

Berdasarkan pada pendapat ahli di atas maka ruang lingkup ilmu pemerintahan terkait dengan gejala-gejala pemerintahan dan semua aktivitas, kegiatan, perbuatan, dan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan yang diperintah. Pemerintah selalu terkait dengan yang diperintah karena memang keberadaannya, tugas, dan fungsinya, sebagaimana telah dijelaskan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup masyarakat (pihak yang diperintah).

Merujuk pada uraian di atas maka ruang lingkup sosiologi pemerintahan terdiri dari:

1. Negara serta Relasinya dengan Pemerintah dan Masyarakat: Pemikiran dan Teori-teori tentang Negara serta Tinjauan Konseptual tentang Negara.
2. Teori Pembentukan Pemerintahan, Tinjauan Konseptual tentang Pemerintah, Pemerintah dan Yang diperintah, Sistem dan Struktur Pemerintahan.
3. Masyarakat dan Stratifikasi Sosial, Modal Sosial dalam Masyarakat, Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintahan.
4. Konsep dan Teori Kekuasaan, Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah, Pembagian kekuasaan Pemerintahan.
5. Membangun Relasi Pusat—Daerah, Urgensi Pemerintahan Daerah, Relasi Pusat—Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

6. Tinjauan Konseptual tentang Organisasi dan Kelembagaan, Organisasi dan Kelembagaan dalam Ranah Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial.
7. Hakekat Kepemimpinan, Kepemimpinan Dalam Perspektif Sosial dan Pemerintahan. Kepemimpinan Pemerintahan dan Perubahan Sosial.
8. Tinjauan Teoritis tentang Perubahan Sosial, Dinamika Pemerintahan Sebagai Bagian Perubahan Sosial, dan Tindakan Pemerintah Sebagai Respons Atas Perubahan Sosial.

Ruang lingkup sosiologi pemerintahan di atas, akan dibahas pada modul-modul selanjutnya. Untuk selanjutnya, silakan Saudara mengerjakan soal dalam latihan berikut!



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik dan sosiologi dilihat dari objek kajiannya.
- 2) Dibanding dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan lebih dekat dengan sosiologi, Jelaskan!
- 3) Untuk lebih memahami sosiologi pemerintahan, perlu mengetahui tentang batasan atau definisi sosiologi politik. Mengapa demikian? dan Berikan satu definisi dari sosiologi politik!
- 4) Rush dan Althoff menolak untuk mengakui sosiologi sebagai cabang sosiologi dan untuk hal tersebut keduanya memberikan batasan sosiologi politik yaitu bidang kajian yang menganalisis fenomena politik (kekuasaan) secara sosiologis. Jelaskan!
- 5) Berikan batasan konseptual sosiologi pemerintahan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat. Ketiganya memiliki objek kajian yang sama karena merupakan bagian dari rumpun ilmu yang sama yaitu ilmu sosial. Objek kajian ilmu sosial sendiri yaitu realitas sosial yang terkait dengan

kehidupan sosial manusia dalam relasinya dengan masyarakat. Oleh karena itu, keterkaitan antara ketiga ilmu ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun begitu, tetap saja ada hal yang membedakan di antara ketiganya karena ilmu pengetahuan itu pada dasarnya sudut pandang, maka ketiga ilmu tersebut pun memiliki sudut pandang masing-masing terhadap objek kajian yang sama.

- 2) Walaupun memiliki objek materi yang sama, relasi ilmu pemerintahan dengan sosiologi lebih dekat dibanding ilmu politik dengan sosiologi. Hal ini terkait dengan keberadaan masyarakat sebagai sub objek materi dari objek materi ilmu-ilmu sosial (kehidupan sosial manusia). Masyarakat ternyata mendapatkan perhatian khusus dari kedua ilmu ini, khususnya bagi sosiologi yang memang menjadikan masyarakat sebagai salah satu kajian utamanya. Sementara bagi ilmu pemerintahan, masyarakat merupakan bagian dari pihak yang diperintah ketika membangun relasi dengan pemerintah.
- 3) Pengetahuan kita terhadap definisi sosiologi politik akan memberikan dampak positif pada sosiologi pemerintahan karena dengan mengetahuinya kita akan dapat memperkuat pendefinisian sosiologi pemerintahan. Penguatan ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan dan juga membedakan sosiologi politik dengan sosiologi pemerintahan. Sekurangnya, dengan mengetahui definisi sosiologi politik, kita akan dapat meminimalisir batasan yang terlalu tumpang tindih antara sosiologi politik dengan sosiologi pemerintahan. Salah satu definisi sosiologi politik dikemukakan Maurice Duverger (2005). Ia mengemukakan adanya 2 (dua) pandangan terkait sosiologi politik ini. *Pertama*, sosiologi politik sebagai ilmu negara. Definisi ini didasarkan pada pandangan politik yang dikonotasikan dengan negara dan negara sendiri yang dibatasi hanya pada sekelompok manusia atau masyarakat. *Kedua*, batasan sosiologi politik yang didasarkan pada konsepsi Leon Duguit terkait perbedaan pemerintah (*governments*) dan yang diperintah (*governers*) sebagai fakta yang mendasar atau fundamental dalam suatu kelompok sosial pada setiap arasnya. Dalam pandangannya, setiap kelompok terlepas dari besar atau kecilnya, tetap atau sementara sifatnya, akan terbagi pada dua pihak yaitu mereka yang memerintah atau memberi perintah dan mereka yang diperintah atau yang harus melaksanakan perintah tersebut, ada yang membuat keputusan dan mematuhi keputusan itu. Berdasarkan fakta tersebut,

Sosiologi politik diartikan sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia.

- 4) Selain Duverger, batasan sosiologi politik juga diberikan oleh Rush dan Althoff. Menurutnya sosiologi politik adalah bidang kajian yang menganalisis fenomena politik (kekuasaan) secara sosiologis. Berdasarkan batasan tersebut maka sosiologi politik menjadi bidang subjek yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Oleh karena itu, keduanya menolak jika sosiologi disebut cabang dari sosiologi. Menurutnya para sosiolog hanya sebatas mengkaji saja dan memberi perhatian pada kekuasaan dengan menggunakan pendekatan sosiologis.
- 5) Sebagaimana telah dijelaskan, bidang kajian ilmu sosial memiliki banyak segi, sedangkan satu ilmu (ilmu pemerintahan) hanya mampu mengkaji satu atau beberapa segi saja yang ada dalam bidang sarannya (yang merupakan objek material). Oleh karena itu, segi yang lain pada bidang sasaran yang sama dapat dikaji ilmu yang lainnya (sosiologi). Namun ternyata, pada bidang sasaran tersebut ada segi lain masih dapat dikaji oleh masing-masing ilmu, tetapi akan lebih tepat jika dalam pengkajiannya dilakukan secara bersama-sama. Kondisi tersebut akan melahirkan cabang ilmu dan kalau meminjam konsep di dunia pertanian cabang ilmu ini merupakan hasil proses persilangan (hibridisasi) antara ilmu pemerintahan dan sosiologi. Cabang ilmu yang dimaksud yaitu sosiologi pemerintahan. Oleh karena itu, sosiologi pemerintahan dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan (berupa semua aktivitas, kegiatan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara) secara sosiologis.



## RANGKUMAN

---

Ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan sosiologi memiliki hubungan atau relasi yang sangat erat. Ketiganya memiliki objek kajian yang sama karena merupakan bagian dari rumpun ilmu yang sama yaitu ilmu sosial. Objek kajian ilmu sosial sendiri yaitu realitas sosial yang terkait dengan kehidupan sosial manusia dalam relasinya dengan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan, bidang kajian ilmu sosial memiliki banyak segi, sedangkan satu ilmu (ilmu pemerintahan) hanya mampu mengkaji satu atau beberapa segi saja yang ada dalam bidang sasarannya (yang merupakan objek material). Oleh karena itu, segi yang lain pada bidang sasaran yang sama dapat dikaji ilmu yang lainnya (sosiologi). Namun ternyata, pada bidang sasaran tersebut ada segi lain masih dapat dikaji oleh masing-masing ilmu, tetapi akan lebih tepat jika dalam pengkajiannya dilakukan secara bersama-sama.

Kondisi tersebut akan melahirkan cabang ilmu dan kalau meminjam konsep di dunia pertanian cabang ilmu ini merupakan hasil proses persilangan (hibridisasi) antara ilmu pemerintahan dan sosiologi. Cabang ilmu yang dimaksud yaitu sosiologi pemerintahan.

Sosiologi pemerintahan diartikan sebagai studi yang mempelajari gejala-gejala pemerintahan (berupa semua aktivitas, kegiatan, perbuatan, dan tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung pada masyarakat sebagai pihak yang diperintah dalam suatu negara) secara sosiologis.

Sebagai suatu studi, sosiologi pemerintahan memiliki ruang lingkup sendiri, tetapi tetap ada ketersinggungan dengan kedua ilmu induknya. Ruang lingkup sosiologi pemerintahan meliputi Negara serta Relasinya dengan Pemerintah dan Masyarakat; Pemikiran dan Teori-teori tentang Negara serta Tinjauan Konseptual tentang Negara; Teori Pembentukan Pemerintahan, Tinjauan Konseptual tentang Pemerintah, Pemerintah dan Yang diperintah, Sistem dan Struktur Pemerintahan; Masyarakat dan Stratifikasi Sosial, Modal Sosial dalam Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan; Konsep dan Teori Kekuasaan, Kekuasaan dan Kewenangan Pemerintah, Pembagian kekuasaan Pemerintahan; Membangun Relasi Pusat—Daerah, Urgensi Pemerintahan Daerah, Relasi Pusat—Daerah Dalam Tata Kelola Pemerintahan; Tinjauan Konseptual tentang Organisasi dan Kelembagaan, Organisasi dan Kelembagaan dalam Ranah Pemerintahan, Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial; Hakekat Kepemimpinan, Kepemimpinan Dalam Perspektif Sosial dan Pemerintahan. Kepemimpinan Pemerintahan dan Perubahan Sosial; Tinjauan Teoritis tentang Perubahan Sosial, Dinamika Pemerintahan Sebagai Bagian Perubahan Sosial, dan Tindakan Pemerintah Sebagai Respons Atas Perubahan Sosial.

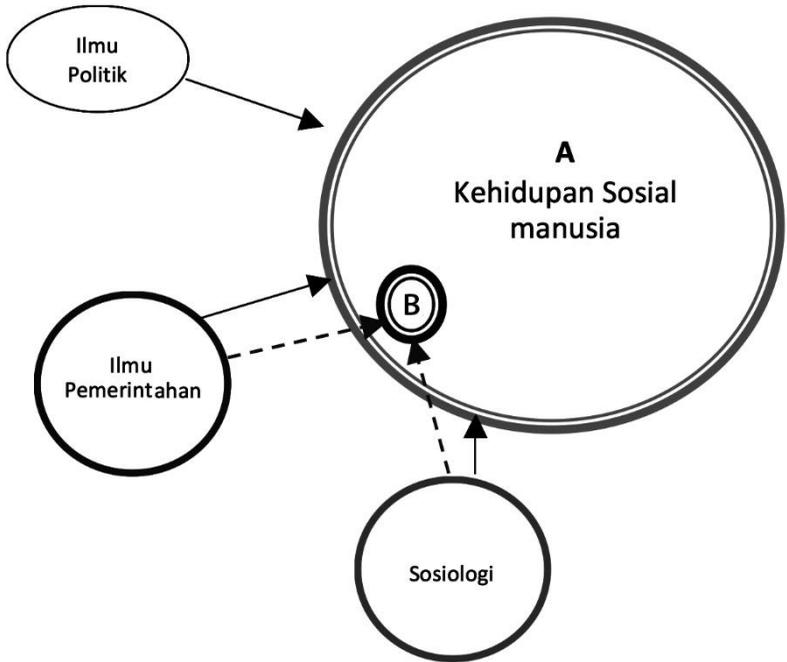
**TES FORMATIF 2**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmu yang mengkaji pemerintahan polis ini oleh sebagian ahli dinamakan dengan ilmu kenegaraan atau ilmu tentang negara karena polis diartikan dengan kata negara. Hal ini dapat dilihat pada ahli yang menyadur buku Plato, Politeia, dengan judul “De Staat” (Negara). Ahli yang dimaksud adalah ....
  - A. Von Schmid
  - C. George Sabine
  - D. Garfield
  - E. Mac Iver
  
- 2) Dalam mendefinisikan sosiologi politik, Maurice Duverger menggunakan dua pandangan yaitu sosiologi politik sebagai ....
  - A. ilmu tentang negara dan ilmu tentang masyarakat
  - B. ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan
  - C. ilmu tentang kelompok masyarakat politik dan ilmu tentang kekuasaan
  - D. ilmu tentang kekuasaan dan ilmu tentang masyarakat
  
- 3) Sebagai suatu studi, sosiologi pemerintahan memiliki sudut pandang sendiri terhadap objek yang menjadi kajiannya. Dalam konteks objek suatu ilmu, yang dimaksud sudut pandang tersebut adalah
  - A. *subject matter*
  - B. objek material
  - C. subjek formal
  - D. *focus of interest*

4)



Jika “A” adalah realitas sosial dan merupakan objek material bagi ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan sosiologi maka untuk ilmu pemerintahan dan sosiologi “B” menjadi ....

- A. sub objek material
  - B. objek formal
  - C. objek material
  - D. titik bidik
- 5) Sosiologi pemerintahan merupakan studi yang dihasilkan oleh ilmu pemerintahan dan sosiologi. Proses pembentukan ilmu tersebut dalam konsep pertanian disebut
- A. hibriditas
  - B. hibridisasi
  - C. hibrisasi
  - D. hibridisme

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 3**

## Ragam Penelitian Sosiologi Pemerintahan: Pendekatan, Paradigma Ilmu, dan Ragam Paradigma Penelitian

### A. PENDEKATAN

Selaras dengan objek kajian yang akan dibahasnya yaitu gejala, fakta, dan realitas pemerintahan maka penelitian yang akan dilakukan studi sosiologi pemerintahan berupaya untuk memahami berbagai hal menyangkut dinamika kehidupan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dan relasinya dengan pemerintah, secara sosiologis. Oleh karena, dalam mencari makna kebenaran ilmunya dilakukan penelitian baik dengan pendekatan objektivitas maupun subjektivitas terhadap fakta sosial yang ditemukan.

Pendekatan objektivitas memandang suatu fakta sosial itu sebagai serangkaian tindakan sosial yang dilakukan individu yang diukur yang didasarkan pada studi empiris dan positif dengan pembuktiannya dinyatakan dalam data, angka, dan fakta. Misalnya, tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di suatu daerah atau tingkat ketidakmandirian masyarakat perkotaan di suatu daerah. Pendekatan objektivitas ini melahirkan penelitian kuantitatif. Sementara, pendekatan subjektivitas sebaliknya, fakta sosial tidak dibuktikan dengan data dan angka, tetapi pada ukuran-ukuran yang bersifat subjektif. Pendekatan ini melahirkan penelitian kualitatif yang menekankan bahwa realitas sosial tidak sekedar angka-angka, tetapi makna dibalik angka-angka.

Sebagai contoh ketika kita membahas kemiskinan masyarakat. Sering kali kita dihadapkan pada persoalan yang selalu tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Selama ini, pemerintah menggunakan ukuran kuantitatif dalam menetapkan miskin atau tidaknya seseorang seperti bentuk rumah, ketersediaan sarana prasarana di dalamnya dan sebagainya yang ukurannya jelas dan pasti. Oleh karena itu, ketika petugas sensus datang ke suatu perkampungan tempat tinggal masyarakat adat, ia menyimpulkan bahwa masyarakat tersebut berada dalam kondisi yang miskin karena petugas tersebut tidak menemukan persyaratan yang ditetapkan. Namun, kesimpulan petugas tersebut jelas ditentang oleh masyarakat tersebut karena mereka tidak

pernah merasa kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Satu lagi yang tidak dipahami oleh petugas tersebut bahwa masyarakat adat memiliki nilai sendiri terkait dengan pola hidup yang dijalankannya. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa petugas tersebut tidak mampu menangkap dan menerangkan realitas sosial yang sesungguhnya. Ia hanya melihat fakta-fakta yang tampak saja, tetapi tidak mengetahui realita yang sesungguhnya.

Selain tinjauan pendekatan seperti di atas, dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, sosiologi, sosiologi politik, dan juga ilmu-ilmu sejenis lainnya juga dikenal beberapa pendekatan yang biasa digunakan. Pendekatan-pendekatan dalam ilmu-ilmu tersebut secara khusus mengkaji gejala, fakta, dan realitas sosial yang terjadi pada masa kini, masa lalu, dan juga terkait hal yang seharusnya. Secara faktual dan kontekstual fokus pembahasan sosiologi pemerintahan menyangkut realitas pemerintahan yang berkenaan dengan segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan pemerintah pada saat sekarang, masa lalu, dan yang seharusnya dilakukan dalam relasinya dengan yang diperintah.

Beberapa pendekatan yang dimaksud diantaranya:

1. Pendekatan sejarah atau historis (*historical approach*) yang digunakan untuk mengungkapkan gejala atau fakta atau peristiwa dan kesimpulan mengenai hal-hal pada masa lalu suatu pemerintahan.
2. Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang digunakan untuk secara khusus mengamati perilaku pemerintah dan yang diperintah saat keduanya membangun relasi sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya.
3. Pendekatan kelembagaan (*institutional approach*) yang memusatkan penelitiannya pada hal-hal yang terkait dengan kelembagaan (lembaga dan organisasi pemerintahan), konstitusional dan legalistik yang mengatur tentang pemerintah dan tata kelola pemerintahannya termasuk di dalamnya mengenai relasinya dengan yang diperintah.
4. Pendekatan struktural (*structural approach*) yang menekankan pengkajiannya pada relasi struktur yang ada dalam masyarakat dengan segala aktivitas, kegiatan, perilaku, dan tindakan pemerintah dalam tata kelola pemerintahannya.
5. Pendekatan pembangunan (*development approach*) yang digunakan pada pengkajiannya dengan penekanan terhadap aspek pembangunan sosial, politik, dan ekonomi serta relasinya dengan tata kelola pemerintahan.

6. Pendekatan Sistem (*system approach*) yang mencoba mengkaji gejala dan fakta pemerintahan yang didasarkan pada bekerjanya tiap sub sistem yang saling berelasi dan memengaruhi untuk mencapai tujuan.

Kalau dikaji lebih jauh dan dikaitkan dengan kegiatan penelitian, maka pendekatan terhadap makna kebenaran dengan kebenaran dalam sosiologi pemerintahan itu memiliki relasi yang menarik, karena akan menuntun dengan ketepatan dalam memilihnya. Jika digambarkan relasi keduanya dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel Matriks Keterkaitan

Pendekatan Dalam Sosiologi Pemerintahan	Pendekatan Terhadap Kebenaran	
	Objektivitas (Kuantitatif)	Subjektivitas (Kualitatif)
Sejarah	x	v
Perilaku	v	v
Kelembagaan	v	v
Struktural	x	v
Pembangunan	v	v
Sistem	x	v

Mengingat sosiologi pemerintahan itu objeknya adalah realitas sosial yang bergerak secara dinamis maka penelitian kualitatif lebih tepat untuk digunakan. Namun begitu, tidak berarti juga penelitian kuantitatif tidak dapat digunakan. Dalam batas-batas tertentu mungkin lebih baik atau sekurangnya dapat digunakan baik secara mandiri maupun digunakan bersama-sama dengan kualitatif. Sebagai contoh dalam penelitian perilaku aparat pemerintah dalam kualitas pelayanan publik, pendekatan bisa dilakukan dengan perilaku dengan menggunakan penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif.

Masih ada pendekatan lainnya yang mungkin dapat digunakan dalam studi sosiologi pemerintahan. Silakan Saudara cari dan pahami agar menambah pengetahuannya tentang materi dalam Modul 1 ini khususnya tentang ragam penelitian dalam sosiologi pemerintahan. Referensi dari internet dapat digunakan khususnya dalam jurnal-jurnal ilmiah (*e-journal*) dan juga *e-book*.

## B. PARADIGMA ILMU DALAM PENELITIAN SOSIOLOGI

Slattery (2003) menjelaskan bahwa istilah paradigma merujuk pada seperangkat ide, kerangka teoritik, model teori tentang bagaimana masyarakat atau alam bekerja. Dengan mengutip pendapatnya Thomas Kuhn seorang filsuf ilmu pengetahuan Amerika dalam karyanya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) paradigma didefinisikan sebagai prestasi ilmiah yang diakui secara universal yang untuk sementara waktu menyediakan masalah-masalah model dan solusi untuk komunitas para praktisi. Paradigma adalah kerangka kerja yang terpadu dan koheren, cara berpikir dalam bidang ilmu tertentu tentang alam semesta dan cara kerjanya. Paradigma juga merupakan panduan ilmuwan terhadap masalah-masalah tertentu dan menyediakan banyak solusi.

Pendapat yang lain tentang Paradigma ini dikemukakan oleh Bhaskar seperti dikutip oleh Salim (2001) yang mengartikannya sebagai “*a set of assumptions and beliefs concerning* yaitu asumsi yang dianggap benar (secara *given*). Untuk dapat sampai pada asumsi itu harus ada perlakuan empirik (melalui pengamatan) yang tidak terbantahkan; *accepted assume to be true*”. Dari penjelasan ini, kemudian Salim (2001) berpendapat bahwa paradigma dapat dikatakan sebagai “*a mental window*, tempat terdapat “frame” yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena masyarakat pendukung paradigma telah memiliki kepercayaan”.

Paradigma juga diartikan sebagai suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensi atau epistemologi yang panjang (Mulyana, 2003).

Selanjutnya, para ilmuwan mengembangkan sejumlah perangkat yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu ilmu dan cara mendapatkan kebenaran tersebut. Tradisi ini menurut Salim (2001) secara sistematis telah dikembangkan Descartes dan para pengikutnya ketika mengembangkan cara pandang positivisme. Sementara untuk mengetahui pengembangan suatu paradigma ilmu dan posisi paradigma ilmu yang digunakan seseorang atau yang akan dikembangkannya di kemudian hari, menurut Salim (2001) dapat dilihat dari jawabannya (terutama) pada tiga pertanyaan dasar yang menjadi

aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan metodologi.

1. **Dimensi ontologi**, yang terkait dengan hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui (*knowable*), atau hakikat dari suatu realitas (*reality*). Dengan demikian, dimensi yang dipertanyakan adalah hal yang nyata (*what is the nature of reality*).
2. **Dimensi epistemologi**, terkait dengan hakikat hubungan antara pencari ilmu (*inquirer*) dan objek yang ditemukan (*know* atau *knowable*).
3. Dimensi aksiologi, terkait dengan peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian.
4. Dimensi retorik, terkait dengan bahasa yang digunakan dalam penelitian.
5. **Dimensi metodologi**, terkait dengan cara atau metodologi yang dipakai dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

Sebagaimana telah dijelaskan, paradigma merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kuhn yang merujuk pada seperangkat ide, kerangka teoritik, model teorik tentang bagaimana masyarakat atau alam bekerja (Slaterry, 2003). Ritzer (1975) dalam Salim (2001) juga berpandangan sama dengan Kuhn yang menyebutkan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang hal yang menjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma dapat menjadi beragam karena adanya perbedaan pandangan filosofis. Ritzer (1981) memandang sosiologi terkait dengan paradigma ini sebagai *a multiple paradigm science*.

## C. RAGAM PARADIGMA PENELITIAN

### 1. Positivisme

**Positivisme** merupakan salah satu paradigma ilmu sosial. Bahkan ia menjadi paradigma pertama yang dikembangkan ilmuwan dalam menemukan hakikat realita. Dalam penjelasannya, Denzin dan Guba seperti dituturkan Salim (2001), keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada (*exist*) dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam (*natural laws*). Upaya penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas tersebut senyawanya berjalan.

Neuman (2000) menjelaskan bahwa positivisme muncul pada abad ke-19 dimotori oleh Sosiolog Auguste Comte, dengan karyanya *The Course of Positive Philosophy (1830—1842)*. Comte menguraikan secara garis besar prinsip-prinsip positisme yang hingga kini masih banyak digunakan. John Stuart Mill (1843) memodifikasi dan mengembangkan pemikiran Comte ini dalam suatu karya yang cukup monumental berjudul *A System of Logic*. Sedangkan Emile Durkheim menguraikan satu versi dari positivisme dalam *Rules of the Sociological Methods (1895)*, yang menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti sosial yang beraliran positivis.

Lebih lanjut Neuman (2000) mengatakan positivisme ini diasosiasikan dengan beberapa teori sosial yang spesifik. Di antaranya struktural fungsional, pilihan rasional, dan kerangka teori pertukaran. Para peneliti aliran ini lebih menyukai data kuantitatif dan sering melakukan percobaan, survey, dan statistik. Mereka melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang ketat, tepat, dan “objektif”, dan melakukan uji hipotesis dengan hati-hati, menganalisis sejumlah data dari hasil pengukuran. Neuman sampai pada kesimpulan bahwa positivisme melihat ilmu sosial sebagai metode yang terorganisir untuk menggabungkan logika deduktif dengan ketepatan pengamatan empiris terhadap perilaku individu dalam rangka menemukan dan mengonfirmasikan serangkaian hukum kausal probabilistik yang dapat digunakan untuk memprediksi pola umum dari aktivitas manusia.

Adapun ciri-ciri pandangan positivisme antara lain (Nasution, 2003):

- a. Logika eksperimen dengan memanipulasi variabel empiris dengan teori bermain-main dengan variabel (konfirmasi logika) parti memilih pejabat publik (yang dapat diukur secara kuantitatif agar dapat dicari hubungan antara berbagai variabel).
- b. Mencari hukum universal yang dapat meliputi semua kasus, walaupun dengan pengolahan statistik dicapai tingkat probabilitas, dengan mementingkan sampling untuk mencari generalisasi.
- c. Netralitas pengamatan dengan hanya meneliti gejala-gejala yang dapat diamati langsung dengan mengabaikan apa yang tidak dapat diamati dan diukur dengan instrumen yang valid dan reliabel.
- d. Berpendirian tidak ada akibat tanpa sebab tertentu dan tidak ada sebab tanpa akibat. Hubungan sebab akibat bersifat linier.

Aspek-aspek Keilmuan Positivisme (Creswell, 2002; Lincoln, Yvonna S and Egon G. Guba. 2000; Salim, 2001)

a. *Ontologi*

Positivisme memandang kenyataan yang dapat dimengerti itu ada dan dikendalikan oleh hukum dan mekanisme alam yang kekal (*realism*). Pengetahuan mengenai gejala-gejala disajikan dalam bentuk generalisasi yang bebas waktu dan konteks, juga dalam bentuk hukum sebab akibat. Bagi peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif, maka peneliti memandang yang diteliti atau kenyataan sebagai objek, sesuatu yang berada di sana (*out there*), bebas dari penelitiannya, dapat diukur secara objektif menggunakan instrumen dan kuesioner.

b. *Epistemologi*.

Positivisme bersifat dualistik dan objektif, dalam arti peneliti dan yang diteliti diasumsikan sebagai sesuatu yang saling tidak memengaruhi atau terpengaruh. Peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitiannya. Pada penelitian yang menggunakan kuantitatif, peneliti harus mempertahankan jarak dan bebas dari yang diteliti. Jadi, berusaha objektif dalam meneliti situasi.

c. *Metodologi*

Pada positivisme eksperimen dan manipulasi, menjadi acuan yang utama. Pertanyaan dan hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi yang harus diuji untuk mengetahui kebenarannya. Kondisi-kondisi yang bisa mengacaukan harus dapat dikontrol (dimanipulasi) untuk mencegah pengaruhnya pada pengeluaran. Kegiatan pengujian dilakukan dengan analisis kuantitatif. Adapun kualitas penelitiannya yaitu objektif, reliabel, dan validitas.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, logika yang digunakannya adalah deduktif yang menguji teori-teori dan hipotesis-hipotesis dalam urutan sebab—akibat. Tujuan penelitiannya adalah mengembangkan generalisasi yang memberikan kontribusi pada teori dan yang akan membuat peneliti bisa meramalkan, menjelaskan, dan memahami gejala-gejala yang lebih baik.

d. *Aksiologi*

Pada kelompok positivisme (dan postpositivisme), “nilai”, etika, dan pilihan moral harus berada di luar proses penelitian. Peneliti harus dapat membebaskan diri dari objek yang dikaji karena sikap ilmiah menghendaki

adanya jarak yang menetralsir kedudukan peneliti, dalam hal ini peneliti berperan sebagai *disinterested scientist*. Dalam penelitian yang menggunakan kuantitatif, nilai-nilai yang dianut peneliti dilarang keras memengaruhi penelitiannya. Tujuan penelitiannya yaitu eksplanasi sehingga dapat meramalkan dan mengendalikan gejala, baik gejala fisik maupun perilaku manusia.

## 2. *Post-Positivism*

*Post-positivisme* menjadi ragam paradigma penelitian yang kedua yang dikembangkan para ahli. Paradigma ini berangkat dari pandangan para peneliti *post-positivisme* terhadap positivis yang dianggap memiliki keterbatasan dalam memahami realitas sosial atau fenomena. *Post-positivisme* muncul sebagai perbaikan atas paradigma positivis yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sebagaimana Muhajir (1990) jelaskan bahwa dalam hal sumber kebenaran, *positivisme* percaya bahwa kebenaran itu hanya bersumber dari empiri sensual, artinya kebenaran hanya bersumber pada hal yang ditangkap oleh pancaindera.

Dibanding *positivisme*, *post-positivisme* lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Jadi suatu ilmu memang betul mencapai suatu objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara. Dalam paham ini, paradigma hanya diakui berfungsi sebagai lensa dan bukan kacamata. Paradigma ini juga menjadi aliran atau paham yang mengoreksi positivis yang selama ini menguasai kalangan ilmuwan dalam mengungkap kebenaran suatu realitas (Salim, 2001). Dalam paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna (Sugiyono, 2005).

*Post-positivisme* memandang sumber kebenaran itu tidak hanya bersumber pada empiri sensual, tetapi juga bersumber pada empiri logik (pikiran), etik (idealisme realitas), dan juga transadental (keyakinan). Selanjutnya pada pandangan teori yang dihasilkan, paradigma *postpositivisme* mengacu kepada dasar pengetahuan idiografik, yaitu yang mengarah kepada pemahaman peristiwa atau kasus-kasus tertentu, tidak seperti positivis yang mengacu pada dasar pengetahuan *nomotetik* (prediksi dan generalisasi) yang mengacu pada pengembangan hukum-hukum umum (Muhajir, 1990).

Aspek-aspek Keilmuan Post-Positivisme (Creswell, 2002; Lincoln, Yvonna S and Egon G. Guba. 2000; Salim, 2001)

a. *Ontologi*

*Post-positivisme* bersifat *critical realism* yang memandang kenyataan atau realitas itu ada, tetapi karena keterbatasan manusia dan sifat dari alam itu sendiri, maka kenyataan itu tidak dapat dimengerti secara sempurna artinya. Realitas dikontrol oleh hukum alam yang hanya dapat dipahami sebagian saja.

b. *Epistemologi*

*Post-positivisme* memodifikasi sifat dualistik dan objektif. Dualisme ditinggalkan karena dianggap tidak mungkin, namun objektivitas tetap dicoba untuk dipertahankan. Secara epistemologi ini, hubungan antara peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan. *Post-positivisme* menyatakan suatu ketidakmungkinan melihat atau mencapai kebenaran apabila pengamat atau peneliti berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek yang ditelitinya secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara peneliti dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa peneliti harus bersifat senetral mungkin, sehingga subjektivitas dapat dikurangi secara minimal.

c. *Metodologi*

*Post-positivisme* memodifikasi eksperimen dan manipulasi, di sini digunakan *critical-multiplism* sebagai cara membuktikan kesalahan (*falsifikasi*), bukan kebenaran tapi bentuk hipotesis. Metodologi yang digunakan menekankan penelitian yang dilakukan pada keadaan alami, mengumpulkan informasi situasional dan memperkenalkan penemuan sebagai elemen penelitian dan memanfaatkan cara pandang *emic* untuk membantu memahami makna dan maksud yang terkandung dalam tindakan manusia

d. *Aksiologi*

Pada *post-positivisme* nilai, etika, dan pilihan moral peneliti mulai terlibat dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan bahkan sampai pada proses pengambilan kesimpulan. Jadi nilai, etika, dan moral berada dalam arus diskusi. Peneliti berperan sebagai mediator antara sikap ilmiah dan objek penelitian. Tujuan penelitiannya eksplanasi, prediksi, dan kontrol.

### 3. Teori Kritis/*Critical Theory*

**Teori Kritis** merupakan paradigma yang masih diragukan keparadigmaannya. Paradigma ini lebih tepat disebut *ideologically oriented inquiry* yaitu suatu wacana atau cara pandang terhadap realitas yang mempunyai orientasi ideologis terhadap paham tertentu.

#### a. *Ontologi*

Secara ontologi, paham paradigma ini sama dengan *post-positivisme* yang menilai objek atau realita secara kritis (*critical realism*), yang tidak bisa dilihat secara benar oleh pengamatan manusia (peneliti). Realitas yang teramati merupakan realitas semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi politik.

#### b. *Epistemologi*

Hubungan antara peneliti dengan realitas yang menjadi objek yang diteliti merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, aliran ini lebih menekankan pada konsep subjektivitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan. Nilai-nilai yang dianut oleh pengamat atau peneliti tercampur dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal.

#### c. *Metodologi*

Terkait dengan hal yang diuraikan dalam ontologi maka metodologi teori kritis ini mengajukan metode dialog dengan transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki. Jadi, paradigma ini mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan multi level analisis yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial.

#### d. *Aksiologi*

Peneliti dalam teori kritis bersifat partisipan aktif yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Jadi nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu penelitian. Peneliti menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, advokat, dan aktivis. Tujuan penelitiannya kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan pemberdayaan sosial.

#### 4. Konstruktivisme (Yvonna S. Lincoln)

Paradigma ini muncul dengan penolakan pada tiga prinsip dasar positivisme yaitu: 1) ilmu merupakan upaya mengungkap realita; 2) hubungan subjek dan objek penelitian harus dapat dijelaskan; 3) hasil temuan memungkinkan untuk digunakan dalam proses generalisasi pada waktu dan tempat yang berbeda.

##### a. *Ontologi*

Ontologi dari paradigma konstruktivisme terkait dengan realitas sebagai konstruksi sosial. Realitas ada sebagai seperangkat bangunan yang menyeluruh dan bermakna yang bersifat konfliktual dan dialektis. Karena itu, gejala atau fenomena dipandang dengan menganut prinsip relativitas. Konstruktivisme ini lebih cenderung menciptakan ilmu yang diekspresikan dalam bentuk pola-pola teori, jaringan, atau hubungan timbal balik sebagai hipotesis kerja, bersifat sementara, lokal, dan spesifik.

##### b. *Epistemologi*

Hubungan peneliti dengan objek penelitiannya dalam paradigma konstruktivis bersifat interaktif sehingga fenomena dan pola-pola keilmuan dapat dirumuskan dengan memperhatikan gejala hubungan yang terjadi antara keduanya, karena itu hasil rumusan sangat subjektif.

##### c. *Metodologi*

Paradigma konstruktivisme menyatakan bahwa penelitian harus dilakukan di luar laboratorium, yaitu di alam bebas dengan *setting* yang natural dalam rangka menangkap fenomena apa adanya dan secara menyeluruh tanpa ada campur tangan dan manipulasi peneliti. Dengan kondisi ini maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif seperti *partisipant observation*.

##### d. *Aksiologi*

Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dalam suatu penelitian. Jadi, peneliti juga bertindak sebagai *passior ate participant*, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Tujuan penelitiannya rekonstruksi realitas sosial secara dialektik antara peneliti dengan aktor sosial yang diteliti.

Demikian materi keseluruhan dalam modul ini, semoga menjadi stimulan khususnya bagi semua mahasiswa Universitas Terbuka dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya dan berminat pada studi sosiologi pemerintahan. Walau pun modul ini seolah menjadi bahan bacaan wajib, bukan berarti materi yang dibahas sudah tersajikan secara komprehensif. Oleh karena itu, disarankan untuk membaca literatur lain baik berupa buku fisik maupun *e-book*. Sumber juga dapat diambil dari jurnal-jurnal ilmiah yang sekarang mudah didapatkan dengan bantuan teknologi internet.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Ada dua pendekatan dalam membahas suatu kebenaran objektif dan subjektif. Berikan penjelasan singkatnya?
- 2) Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam studi sosiologi pemerintahan. Berikan penjelasan singkat terhadap dua pendekatan saja dari pendekatan-pendekatan yang dimaksud!
- 3) Jelaskan batasan konseptual paradigma seperti dikemukakan Thomas Kuhn!
- 4) Terdapat tiga pertanyaan dasar yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan. Jelaskan!
- 5) Apa yang dimaksud dengan *a multiple paradigm*?

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

- 1) Pendekatan objektivitas memandang suatu fakta sosial sebagai serangkaian tindakan sosial yang dilakukan individu yang diukur yang didasarkan pada studi empiris dan positif dengan pembuktiannya dinyatakan dalam data, angka dan fakta. Sementara, pendekatan subjektivitas sebaliknya, fakta sosial tidak dibuktikan dengan data dan angka, tetapi pada ukuran-ukuran yang bersifat subjektif. Pendekatan objektif melahirkan penelitian kuantitatif, sedangkan pendekatan subjektif melahirkan penelitian kualitatif yang menekankan bahwa realitas sosial tidak sekedar angka-angka, tetapi makna dibalik angka-angka.

- 2) Pendekatan sejarah atau historis (*historical approach*) yang digunakan untuk mengungkapkan gejala atau fakta atau peristiwa dan kesimpulan mengenai hal-hal pada masa lalu suatu pemerintahan;  
Pendekatan perilaku (*behavioral approach*) yang digunakan untuk secara khusus mengamati perilaku pemerintah dan yang diperintah saat keduanya membangun relasi sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya.
- 3) Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai prestasi ilmiah yang diakui secara universal yang untuk sementara waktu menyediakan masalah-masalah model dan solusi untuk komunitas para praktisi. Paradigma adalah kerangka kerja yang terpadu dan koheren, cara berpikir dalam bidang ilmu tertentu tentang alam semesta dan cara kerjanya. Paradigma juga merupakan panduan ilmuwan terhadap masalah-masalah tertentu dan menyediakan banyak solusi.
- 4) Ada tiga dimensi utama yang menjadi aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan yaitu dimensi ontologi, yang terkait dengan hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui (*knowable*), atau hakikat dari suatu realitas (*reality*). Dengan demikian, dimensi yang dipertanyakan adalah hal yang nyata (*what is the nature of reality*); dimensi epistemologi, terkait dengan hakikat hubungan antara pencari ilmu (*inquirer*) dan objek yang ditemukan (*know* atau *knowable*) dan dimensi metodologi, terkait dengan cara atau metodologi yang dipakai dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan.
- 5) Paradigma merupakan istilah yang dikemukakan oleh Kuhn yang merujuk pada seperangkat ide, kerangka teoritik, model teorik tentang bagaimana masyarakat atau alam bekerja. paradigma juga adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang hal yang menjadi pokok kajian yang semestinya harus dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan. Paradigma dapat menjadi beragam karena adanya perbedaan pandangan filosofis. Ritzer memandang sosiologi terkait dengan paradigma ini sebagai *a multiple paradigm science*.

**RANGKUMAN**

---

Pendekatan dalam mencari kebenaran ada dua yaitu pendekatan objektivitas dan subjektivitas. Pendekatan objektivitas memandang suatu fakta sosial sebagai serangkaian tindakan sosial yang dilakukan individu yang diukur yang didasarkan pada studi empiris dan positif dengan pembuktiannya dinyatakan dalam data, angka dan fakta, sedangkan pendekatan subjektivitas sebaliknya, fakta sosial tidak dibuktikan dengan data dan angka tetapi pada ukuran-ukuran yang bersifat subjektif. Sementara pendekatan dalam studi sosiologi pemerintahan meliputi pendekatan sejarah atau historis (*historical approach*), pendekatan perilaku (*behavioral approach*), pendekatan kelembagaan (*institutional approach*), pendekatan struktural (*structural approach*), dan pendekatan pembangunan (*development approach*).

Paradigma merupakan suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensi atau epistemologi yang panjang. Dalam penelitian, paradigma memiliki ragam sendiri yaitu positivis, postpositivis, kritis, dan konstruktivis.

**TES FORMATIF 3**

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pendekatan yang dalam mencari kebenarannya memandang suatu fakta sosial itu sebagai serangkaian tindakan sosial yang dilakukan individu yang diukur yang didasarkan pada studi empiris dan positif dengan pembuktiannya dinyatakan dalam data, angka dan fakta disebut ....
  - A. subjektivitas
  - B. objektivitas
  - C. fungsional
  - D. struktural
  
- 2) Pendekatan yang digunakan untuk secara khusus mengamati perilaku pemerintah dan yang diperintah saat keduanya membangun relasi sosial, politik, pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya, adalah pendekatan ....

- A. historis
  - B. kelembagaan
  - C. perilaku
  - D. pembangunan
- 3) Istilah paradigma merujuk pada seperangkat ide, kerangka teoritik, model teoritik tentang bagaimana masyarakat atau alam bekerja. Istilah paradigma dikemukakan oleh ....
- A. Thomas Kuhn
  - B. Slattery
  - C. Roy Bhaskar
  - D. Comte
- 4) Salah satu paradigma dalam penelitian yaitu positivisme. Ada pun ciri-cirinya yaitu ....
- A. logika eksperimen dengan memanipulasi variabel empiris dengan teori bermain-main dengan variabel (konfirmasi logika) pasti memilih pejabat publik (yang dapat diukur secara kuantitatif agar dapat dicari hubungan antara berbagai variabel).
  - B. mencari hukum universal yang dapat meliputi semua kasus, walaupun dengan pengolahan statistik dicapai tingkat probabilitas, dengan mementingkan sampling untuk mencari generalisasi.
  - C. netralitas pengamatan dengan hanya meneliti gejala-gejala yang dapat diamati langsung dengan mengabaikan apa yang tidak dapat diamati dan diukur dengan instrumen yang valid dan reliabel.
  - D. semua benar.
- 5) Post positivis memandang sumber kebenaran bersumber pada ....
- A. empiri sensual
  - B. empiri logik
  - C. transadental
  - D. semua benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A. Statis dan dinamis.
- 2) B. Objek material dan formal.
- 3) A. Konflik, Rasional, Durkheim, dan Interaksionisme.
- 4) D. Fungsional.
- 5) B. Strukturalis.

### *Tes Formatif 2*

- 1) A. Von Schmid
- 2) B. Ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan.
- 3) D. *Focus of interest*
- 4) C. Objek material.
- 5) B. Hibridisme.

### *Tes Formatif 3*

- 1) A. Subjektivitas.
- 2) C. Perilaku.
- 3) B. Slattery.
- 4) D. Semua benar.
- 5) D. Semua benar.

## Daftar Pustaka

- Calhoun, C., et.al. (1994). *Sociology* (6<sup>th</sup> Ed.). McGraw-Hill, Inc. USA.
- Charon, J.M. (1980). *The Meaning of Sociology*. Alfred Publishing Co.Inc.
- Collin, Randall. (1994). *Four Sociological Traditions*. New York: Oxford University Press.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln (ed). (2000). *Handbook of Qualitative Research* (2<sup>nd</sup> Ed.). California: Sage Publication, Inc.
- Duverger, Maurice. (2005). *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Giddens, Anthony, (2004). *Sociology* (4<sup>th</sup> Ed.). London: Polity Press and Blackwell Publisher.
- Kerlinger, Fred N. (2000). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Neuman, W. Lawrence. (2000). *Social Research Methods*. (4<sup>th</sup> Ed). Wisconsin: A Pearson Education Company.
- Rush, Michael dan Philip Althof. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Shadily, Hasan. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Slattery, Martin. (2003). *Key Ideas in Sociology*. London: Nelson Thornes Ltd.

Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sorokin, P.A. (1959). *Social and Cultural Mobility*. London: Collier-Macmillan Ltd.

Turner, Jonathan H. et al. (1998). *The Structure of Sociological Theory*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.